



BUPATI PURBALINGGA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 73
TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa dalam upaya untuk melaksanakan pembangunan daerah yang terarah, terkoordinasi, efektif, dan efisien, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 73 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah / RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1) ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 73 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 73) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RKPD Perubahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016.
 - (2) Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 3 huruf b dan huruf c diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

RKPD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021 dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam penyusunan:

- a. Renja SKPD;
- b. Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan;
- c. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan(RAPBDP).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 9 Juni 2016

BUPATI PURBALINGGA

TASDI

Diundangkan di Purbalingga

Pada tanggal 10 Juni 2016

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

SUSILO UTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016
NOMOR 32

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2016

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa datang. Dalam perspektif pembangunan, terdapat periodisasi perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang (20 tahunan) yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), perencanaan jangka menengah (5 tahunan) yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan perencanaan jangka pendek (tahunan) yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal tersebut sebagaimana ditegaskan pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menyebutkan bahwa "RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat". Substansi RKPD setidaknya memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaannya, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 telah melalui proses perencanaan *top-down planning* maupun *bottom up planning*. Proses penyusunan dokumen perencanaan tersebut telah dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dan hasil-hasil kajian secara ilmiah terhadap fakta-fakta empiris, serta capaian kinerja tahun 2015, memperhatikan tantangan dan isu strategis yang dihadapi pada tahun 2016, memperhatikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan aspirasi masyarakat serta memperhatikan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Guna mewujudkan sinkronisasi dan sinergi program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan kebijakan pembangunan pada tataran pemerintahan daerah provinsi dan pusat.

Perubahan RKPD Tahun 2016 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selanjutnya Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD, serta menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2016, sampai dengan tersusunnya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

B. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan RKPD

Kewajiban daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RAPBD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031;
15. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : $\frac{170-10 \text{ Tahun } 2016}{050/3 \text{ Tahun } 2016}$ tentang Kebijakan Umum Program Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 dimaksudkan sebagai :

1. Pedoman bagi SKPD Kabupaten Purbalingga dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016;
2. Pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016;
3. Pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016;
4. Menciptakan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah, serta mewujudkan keterpaduan pembangunan antar wilayah dan antar urusan guna meningkatkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

D. Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD

Dasar pertimbangan perubahan RKPD dengan gambaran tentang perubahan asumsi daerah meliputi: (1) Adanya pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. (2) Adanya perubahan perkembangan kondisi

perekonomian yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan; Kedua pertimbangan tersebut akan dijelaskan pada uraian berikut ini.

1. Adanya pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan RKPD tahun 2016 perlu segera dilaksanakan mengingat dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 terdapat beberapa kegiatan yang perlu penyesuaian jumlah, jenis dan rinciannya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya sampai dengan catur wulan I. Program dan kegiatan yang diusulkan dalam Perubahan RKPD tahun 2016 merupakan respon atas berbagai masalah yang masih timbul di masyarakat yang perlu mendapatkan penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten seperti penanggulangan kemiskinan dan percepatan pembangunan manusia. Perubahan RKPD tahun 2016 juga dilakukan dalam rangka pemenuhan alokasi kebutuhan anggaran belanja operasional dan belanja pegawai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan tetap melakukan peningkatan efisiensi belanja SKPD untuk belanja operasional serta melakukan penajaman komposisi belanja prioritas. Disamping itu, Perubahan RKPD Tahun 2016 dilaksanakan guna meningkatkan stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan aksesibilitas wilayah dan penyediaan infrastruktur dasar sosial dan ekonomi, dengan tetap memperhatikan perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas sosial dan fasilitas umum, pengembangan jaminan sosial dan perlindungan masyarakat miskin serta mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan. Melalui Perubahan RKPD Tahun 2016 juga dimaksudkan dalam rangka meningkatkan keberpihakan (*affirmatif action*), terutama terkait

dengan upaya penanggulangan kemiskinan serta pengembangan usaha mikro dan kecil serta melanjutkan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat bencana dalam rangka mendorong peningkatan dan kelancaran aktifitas sosial ekonomi masyarakat.

2. Adanya perubahan perkembangan kondisi perekonomian yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan

a. Kondisi Perekonomian Nasional dan APBN 2016

Asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen;
2. Tingkat Inflasi sebesar 4,7 persen;
3. Nilai tukar rupiah rata-rata Rp13.900/USD;
4. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,5 persen;
5. Harga minyak mentah Indonesia rata-rata USD50/barel;
6. *Lifting* minyak rata-rata 830 ribu barel/hari; dan
7. *Lifting* gas rata-rata 1.155ribu barel setara minyak.

Asumsi dasar ekonomi makro tersebut, APBN tahun 2016 diharapkan dapat mendukung pencapaian berbagai sasaran pembangunan di tahun 2016 secara lebih efektif, efisien, dan berkualitas. Dari sisi eksternal tantangan sekaligus risiko yang perlu diwaspadai yaitu berasal dari ketidakpastian global dan kebijakan moneter negara maju serta perlambatan ekonomi yang terjadi di Tiongkok. Sementara dari sisi domestik, sumber pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh kelanjutan pembangunan infrastruktur yang diharapkan akan mendorong kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Selain itu, tingkat konsumsi yang tetap kuat dan stabil juga akan menopang laju pertumbuhan ekonomi, didukung oleh terjaganya laju inflasi dan daya beli masyarakat.

Komitmen Pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas diharapkan akan memberi dampak positif terhadap perekonomian Nasional dan Daerah,

antara lain dengan ditargetkannya beberapa indikator seperti :
(a) tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,2 persen - 5,5 persen, (b) angka kemiskinan 9,0 persen - 10 persen, (c) indeks gini ratio sebesar 0,39 dan (d) indeks pembangunan manusia sebesar 70,1.

Target defisit anggaran dalam APBN tahun 2016 ditetapkan menjadi Rp.273,2 triliun atau setara 2,15 persen terhadap PDB. Kebijakan defisit tersebut selain melakukan konsolidasi fiskal juga diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal, melalui pengalokasian anggaran untuk kegiatan produktif, peningkatan kapasitas perekonomian, penguatan daya saing, dan menjaga keseimbangan ekonomi makro yang kebijakannya sudah ditegakkan sejak tahun 2015.

Target Pendapatan Negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp1.822,5 triliun, atau Rp25,6 triliun lebih rendah dari yang diusulkan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2016. Target Pendapatan Negara tersebut bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.546,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp273,8 triliun (rasio penerimaan negara terhadap PDB atau tax ratio dalam tahun 2016 sebesar 13,11 persen).

Langkah Pemerintah untuk mencapai target perpajakan didasarkan atas beberapa kebijakan, antara lain melalui kebijakan perpajakan dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha, kebijakan penerimaan perpajakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mempertahankan daya beli masyarakat, kebijakan penerimaan perpajakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional, dan kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mengendalikan konsumsi barang kena cukai.

Dari sisi Belanja Negara, pagu APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp2.095,7 triliun. Alokasi Belanja Negara diarahkan sejalan dengan sembilan agenda prioritas (Nawa

Cita) Pemerintah. Beberapa kebijakan penting belanja negara diantaranya:

Pertama, meningkatkan kinerja aparat pemerintah untuk memacu produktivitas dan peningkatan pelayanan publik.

Kedua, mengarahkan subsidi menjadi lebih tepat sasaran.

Ketiga, melanjutkan program prioritas pembangunan, utamanya : infrastruktur konektivitas, pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman, pariwisata, pertahanan, serta pengurangan kesenjangan, guna semakin memperbaiki kualitas pembangunan;

Keempat, pemenuhan anggaran Kesehatan sebesar 5 persen dari APBN, dengan didukung program yang lebih tajam dan luas, baik dari sisi *demand* maupun sisi *supply*.

Kelima, peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan tidak mampu melalui program bantuan sosial yang lebih berkesinambungan (KIP, KIS), termasuk perluasan cakupan penerima Bantuan Tunai Bersyarat menjadi 6 juta KSM.

Keenam, penyediaan kebutuhan pokok Perumahan melalui program Sejuta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dengan dukungan pembangunan rumah, subsidi bunga kredit, dan bantuan uang muka rumah.

Ketujuh, menyelaraskan kebijakan Desentralisasi Fiskal dengan mengalihkan alokasi Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan di Kementerian/Lembaga ke DAK, agar pembangunan lebih merata dan lebih cepat, yang juga didukung dengan peningkatan alokasi Dana Desa mencapai 6,5 persen dari dan di luar Transfer ke Daerah, sesuai Road Map Dana Desa tahun 2015-2019.

b. Kondisi Perekonomian Kabupaten Purbalingga.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Purbalingga pada 4 tahun terakhir rata-rata 5,75 persen. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga sebesar 5,67 persen, pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 5,79 persen, pada tahun 2013 sebesar 5,61 persen,

pada tahun 2014 sebesar 5,73 persen dan pada tahun 2015 sebesar 5,95 persen. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, PDRB Kabupaten Purbalingga juga terus mengalami kenaikan dimana PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2010 sebesar Rp. 10,85 triliun menjadi Rp.15,94 triliun pada tahun 2014 atau naik sebesar Rp.5,9 triliun. Kenaikan LPE per sektor pada tahun 2014 berkisar pada angka 1,29 - 14,43 persen. Adapun Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan sektor tahun 2014 adalah Lapangan Usaha Jasa Perusahaan (14,43 persen), Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor(12,82 persen); Jasa Pendidikan (12,29 persen); Real Estate (6,76 persen); Pengadaan Listrik dan Gas (6,66 persen) danTransportasi dan Pergudangan (6,01 persen).

PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2014 sebesar Rp. 17,9 juta naik sebesar 11,36 persen dibandingkan tahun 2013, sedangkan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan hanya mengalami peningkatan sebesar 5,7 persen yaitu dari Rp. 12.819.159,7,- pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp. 13.554.296,8,- pada tahun 2014. Besarnya selisih kenaikan PDRB per kapita Atas Dasar harga Berlaku dengan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan disebabkan karena relatif tingginya tingkat inflasi pada tahun 2014 yaitu sebesar 4,43 persen.

Pada triwulan pertama tahun 2016 tingkat inflasi Purbalinga berada pada 0,55 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Maret 2015 - Maret 2016) sebesar 4,15 persen. Kelompok pengeluaran yang memberikan sumbangan terbesar terhadap terjadinya inflasi adalah bahan makanan, sedangkan kelompok pengeluaran yang memberikan sumbangan terbesar terhadap terjadinya deflasi adalah transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.

Kinerja perekonomian nasional dan daerah pada tahun 2014 dan 2015 yang cukup baik memberi harapan yang positif terhadap perekonomian Kabupaten Purbalingga Tahun 2016. Dengan melihat arah kebijakan ekonomi makro yang

ditetapkan Pemerintah dan memperhatikan lingkungan eksternal maupun internal yang berkembang, maka proyeksi perekonomian tahun 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Proyeksi Ekonomi Makro tahun 2016
Kabupaten Purbalingga

NO	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	REALISASI		BERTAMBAH / BERKURANG	PROYEKSI 2016
			2013	2014		
1	PDRB (harga berlaku)	Rp. 000.000	14.169.966,6	15.946.675,6	1.776.709,00	19.473.775
2	PDRB (harga konstan)	Rp. 000.000	12.819.159,7	13.554.296,8	735.137,10	14.360.780
3	PDRB per kapita	Rp. 000	16.104.033,8	17.933.452,1	1.829.418,24	18.733.418,1
4	Pertumbuhan Ekonomi (Harga Berlaku)	persen	11,57	12,54	0,97	± 12,5
5	Pertumbuhan Ekonomi (Harga Konstan)	persen	5,61	5,73	0,12	± 5,95
6	Tingkat Inflasi	persen	8,5	4,3	-4,20	4
7	Pertumbuhan Penduduk	persen	0,32	1,06	-0,74	0,8
8	Persentase Penduduk Miskin	persen	20,53	19,75	-0,78	19
9	Tingkat Pengangguran	persen	5,72	5,13	-0,59	5
10	Indeks Pembangunan Manusia	angka	65,53	66,23	0,70	66,5

Sumber : data diolah, Bappeda Kabupaten Purbalingga

E. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

- 1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah
 - a. Kebijakan Pendapatan Tahun 2016

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga dilaksanakan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1

(satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah; b) Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah / PAD, dana perimbangan, dan lain-lain penerimaan yang sah. Adapun kebijakan pendapatan daerah yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

- 1) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembaharuan data potensi PAD sesuai dengan kondisi riil dan peningkatan kualitas SDM pengelola PAD;
- 2) Optimalisasi penerimaan bagian laba BUMD;
- 3) Optimalisasi penerimaan yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan – P2;
- 4) Optimalisasi penerimaan dana perimbangan baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

b. Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 diproyeksikan akan mencapai Rp.1.855.427.348.000,- yang bersumber dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp.217.331.362.000,- atau sekitar 11,71 persen dari total pendapatan. Apabila dibandingkan dengan PAD Tahun Anggaran 2016, pendapatan tersebut direncanakan ada kenaikan sebesar Rp.17.542.678.000,- Sumbangan terbesar Pendapatan Asli Daerah didapat dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, kemudian diikuti pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 2) Dana Perimbangan diproyeksikan sebesar Rp1.280.070.471.000,-. Sedangkan apabila dibandingkan dengan total pendapatan yang direncanakan diterima pada Tahun Anggaran 2016, sumbangan dana perimbangan tersebut mencapai angka 68,99 persen. Sumbangan terbesar Dana Perimbangan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai angka Rp.

897.337.823.000,- disusul Dana Alokasi Khusus yang diproyeksikan sebesar Rp.353.013.478.000,- dan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak sebesar Rp.29.719.170.000,-.

- 3) Pendapatan dari bagian Lain-Lain Penerimaan Daerah Yang Sah diproyeksikan sebesar Rp.358.025.515.000,-. Apabila dibandingkan dengan total pendapatan yang direncanakan diterima pada Tahun Anggaran 2016, sumbangan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tersebut mencapai angka 20,26 persen. Sumbangan terbesar pada bagian Dana Penyesuaian dan Otonomi sebesar Rp.149.527.020.000,-, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.112.992.776.000,-, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.84.304.561.000,- dan Pendapatan Hibah sebesar Rp.11.201.158.000,-.

c. Kebijakan Pendapatan Perubahan Tahun 2016

Mencermati berbagai perkembangan eksternal dan internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga, serta dengan melihat berbagai dinamika perubahan yang terjadi maka kebijakan pendapatan daerah dalam Perubahan Tahun Anggaran 2016 diformulasikan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD, peningkatan kualitas SDM pengelola PAD, mendorong percepatan kinerja dan ketepatan setoran pendapatan;
- 2) Mendorong peningkatan kinerja BUMD dalam rangka peningkatan PAD dari sektor BUMD;
- 3) Peningkatan koordinasi penerimaan yang bersumber dari bagi hasil maupun dana perimbangan baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Berdasarkan kebijakan pendapatan Perubahan Tahun 2016 tersebut, pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga diproyeksikan meningkat menjadi Rp.1.855.427.348.000,- berarti naik sebesar Rp.88.974.897.000,- atau 4,79 persen dari proyeksi pendapatan sebelumnya sebesar Rp. 1.766.452.451.000,-.

Dari jumlah pendapatan daerah tersebut, sumbangan terbesar berasal dari dana perimbangan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Pos Dana Alokasi Umum (DAU), Pos Dana Alokasi Khusus (DAK) yang besarnya mencapai Rp.1.280.070.471.000,- atau sebesar 68,99 persen diikuti oleh Bagian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah/SP3, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari 4,54 persen dari total pendapatan daerah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah memberikan sumbangan terhadap Total Pendapatan Daerah sebesar 11,71 persen atau Rp.217.331.362.000,-.

Tabel 1.1.
Proyeksi Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2016

NO	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN	PROYEKSI APBD 2016	PROYEKSI APBD 2016 PERUBAHAN	PERBEDAAN
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Asli Daerah	199.788.684.000	217.331.362.000	17.542.678.000
1.1	Pajak Daerah	34.641.914.000	36.293.914.000	1.652.000.000
1.2	Retribusi Daerah	31.579.088.000	35.639.741.000	4.060.653.000
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	12.008.086.000	13.859.891.000	1.851.805.000
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	121.559.596.000	131.537.816.000	9.978.220.000
2	Dana Perimbangan	1.039.614.301.000	1.280.070.471.000	240.456.170.000
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	30.109.878.000	29.719.170.000	(390.708.000)
2.2	Dana Alokasi Umum	897.337.823.000	897.337.823.000	-
2.3	Dana Alokasi	112.166.600.000	353.013.478.000	240.846.878.000

NO	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN	PROYEKSI APBD 2016	PROYEKSI APBD 2016 PERUBAHAN	PERBEDAAN
	Khusus			
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	527.049.466.000	358.025.515.000	(169.023.951.000)
3.1	Hibah	10.665.046.000	11.201.158.000	536.112.000
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	86.793.098.000	112.992.776.000	26.199.678.000
3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	398.782.105.000	149.527.020.000	(249.255.085.000)
3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	30.809.217.000	84.304.561.000	53.495.344.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.766.452.451.000	1.855.427.348.000	88.974.897.000
4	Penerimaan pembiayaan			
4.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA. 2015 (SiLPA)	57.727.970.000	264.558.277.000	206.830.307.000
4.2	Pencairan dana cadangan	15.000.000.000	15.000.000.000	-
4.3	Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-
4.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-
4.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-
4.6	Penerimaan	-	-	-

NO	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN	PROYEKSI APBD 2016	PROYEKSI APBD 2016 PERUBAHAN	PERBEDAAN
	piutang daerah			
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	72.727.970.000	279.558.277.000	206.830.307.000
	TOTAL PENERIMAAN DAERAH	1.839.180.421.000	2.134.985.625.000	295.805.204.000

2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

a. Kebijakan Umum Belanja Perubahan Tahun 2016

Perubahan Kebijakan Umum Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 diarahkan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten yaitu berupa urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan tersebut, prioritas belanja daerah dalam Perubahan Anggaran Tahun 2016 didasarkan pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Nota Kesepakatan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada Tahun 2016. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Belanja Daerah APBD Perubahan 2016 diarahkan pada :

- 1) Pemenuhan alokasi kebutuhan anggaran belanja operasional dan belanja pegawai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan tetap melakukan peningkatan efisiensi belanja SKPD untuk belanja operasional serta melakukan penajaman komposisi belanja prioritas.

- 2) Peningkatan stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan aksesibilitas wilayah dan penyediaan infrastruktur dasar sosial dan ekonomi, dengan tetap memperhatikan perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas sosial dan fasilitas umum, pengembangan jaminan sosial dan perlindungan masyarakat miskin serta mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- 3) Peningkatan keberpihakan (*affirmatif action*), terutama terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan serta pengembangan usaha mikro dan kecil.
- 4) Meletakkan landasan yang kokoh dalam rangka percepatan pencapaian sasaran pembangunan pada tahun 2017.
- 5) Melanjutkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat bencana dalam rangka mendorong peningkatan dan kelancaran aktifitas sosial ekonomi masyarakat;
- 6) Memenuhi ketercukupan kebutuhan tunjangan pendidikan sesuai amanat konstitusi untuk mendorong peningkatan pelayanan pendidikan;
- 7) Pemenuhan kewajiban penyediaan dana pendamping / *counterpart budget* untuk program-program Pemerintah Pusat dan Provinsi;
- 8) Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan untuk mengurangi angka kematian bayi dan ibu melahirkan;
- 9) Melakukan persiapan dan perencanaan pendanaan untuk mencukupi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang besar antara lain Pembangunan Bandara, Pembangunan Jembatan Pedan - Tegalpingen, Pembangunan *Islamic Center*, Pembangunan Gedung DPRD serta Modernisasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah.

b. Kebijakan Belanja Tidak Langsung Perubahan 2016

Kebijakan Belanja Tidak Langsung pada 2016 adalah sebesar Rp.1.214.141.028.000,- atau 57,92 persen dari total belanja, yang penggunaannya dialokasikan untuk :

1. Belanja Pegawai.

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, uang representasi pimpinan dan anggota DPRD, serta gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati. Jumlah pegawai Kabupaten Purbalingga tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel I.2
Jumlah Pegawai Kabupaten Purbalingga
Tahun 2016

PANGKAT/GOLONGAN	A	B	C	D	E	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
Golongan I	13	28	106	45	0	192
Golongan II	287	357	863	247	0	1754
Golongan III	1001	1263	862	898	0	4024
Golongan VI	2860	75	31	3	0	2969
						8939

Tabel I.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2016

ESELON	JUMLAH
Eselon II/A	0
Eselon II/B	24
Eselon III/A	54
Eselon III/B	79
Eselon IV/A	374
Eselon IV/B	161
Eselon V/A	61
NON ESELON	8186
	8939

Pada Tahun Anggaran 2016, jumlah belanja pegawai diproyeksikan sebesar Rp.913.165.273.000,- Proporsi belanja pegawai mencapai angka 43,56 persen dari total belanja daerah. Proyeksi belanja pegawai tersebut sudah termasuk pembayaran gaji ke-13 dan THR.

2. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk pembayaran bunga hutang yang dihitung atas kewajiban pokok berdasarkan perjanjian hutang jangka panjang. Dalam Tahun Anggaran 2016, besar belanja bunga diperkirakan hanya sebesar Rp. 24.688.000,- yang digunakan untuk membayar bunga pinjaman ADB.

3. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk peningkatan ekonomi produktif melalui subsidi bunga bagi UMKM. Dalam Tahun Anggaran 2016, besaran belanja subsidi diperkirakan sebesar Rp. 650.000.000,-.

4. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah berupa uang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Dalam Tahun Anggaran 2016, besaran belanja hibah diperkirakan sebesar Rp.15.926.409.000,- yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial serta dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Dalam Tahun Anggaran 2016, besaran belanja bantuan sosial diperkirakan sebesar Rp 24.525.000.000,- yang diberikan kepada orang atau keluarga.

6. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan belanja bagi hasil retribusi dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. Dalam Tahun Anggaran 2016, besaran bagi hasil diperkirakan sebesar Rp 5.822.868.000,-.

7. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya, dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Tahun Anggaran 2016, besaran belanja bantuan keuangan diperkirakan sebesar Rp 252.026.790.000,-.

8. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup. Dalam Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000.000,-.

Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung pada Perubahan APBD 2016 mengalami kenaikan sebesar 3,83 persen atau Rp.46.524.313.000,- yang antara lain terdiri dari :

- 1) Belanja pegawai naik sebesar Rp.29.585.609.000,- dari APBD 2016 Induk sebesar Rp.883.579.664.000,- menjadi Rp.913.165.273.000,-. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya penambahan guru sertifikasi dan kenaikan insentif pajak dan retribusi daerah.
- 2) Belanja hibah naik sebesar Rp.9.992.204.000,- dari APBD 2016 Induk sebesar Rp.5.934.205.000,- menjadi Rp.15.926.409.000,-. Kenaikan ini akan digunakan dalam rangka persiapan Karya bhakti TNI, dan lain-lain.
- 3) Belanja bantuan sosial naik sebesar Rp.4.351.500.000,- dari APBD 2016 Induk sebesar Rp.20.173.500.000,- menjadi Rp. 24.525.000.000,-.

- 4) Belanja bantuan keuangan naik sebesar Rp. 2.445.000.000,- dari APBD 2016 Induk sebesar Rp. 249.581.790.000,- menjadi Rp.252.026.790.000,-
- 5) Belanja tidak terduga tidak mengalami perubahan nilainya sama dengan APBD 2016 Induk sebesar Rp. 2.000.000.000,-

3. Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2016 Perubahan berisikan tentang proyeksi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Kebijakan umum pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 tetap diarahkan untuk :

- 1) Pemanfaatan SILPA Tahun Anggaran 2015;
- 2) Penyertaan modal dalam rangka upaya peningkatan pendapatan dan sekaligus meningkatkan peran BUMD dalam pelayanan masyarakat dan pembangunan perekonomian daerah. Penyertaan modal diarahkan kepada:
 - a). Penyertaan Modal PDAM;
 - b). Penyertaan Modal PD. BPR Artha Perwira;
 - c). Penyertaan Modal PT. BPRS BUANA MITRA PERWIRA;
 - d). Penyertaan Modal PD. BPR BKK;
 - e). Penyertaan Modal Bank Pembangunan Jawa Tengah;
 - f). Penyertaan Modal PD. PUSPAHASTAMA;
 - g). Penyertaan Modal BKK Karangmoncol;
 - h). Penyertaan Modal PD. Purbalingga Modal Ventura;
 - i). Penyertaan Modal PD. OWABONG.

Berdasarkan kebijakan tersebut di atas, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan meningkat dibandingkan pada APBD 2016 Induk yaitu sebesar Rp.206.830.307,000,- dari rencana penerimaan sebelumnya sebesar Rp.

77.727.970.000,- menjadi Rp.279.558.277.000,-. Peningkatan penerimaan pembiayaan tersebut berasal dari peningkatan SILPA Tahun Anggaran 2015 dan Pencairan Dana Cadangan.

Rencana pengeluaran pembiayaan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 38.859.222.000,- naik sebesar Rp.23.283.990.000,- atau 149,5 persen. Pengeluaran pembiayaan tersebut antara lain digunakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemda sebesar Rp.23.795.500.000,-. Selain itu, sebesar Rp.63.722.000,- dialokasikan untuk pembayaran pokok utang.

Tabel I.3. Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung.

NO	URAIAN	PLAFON APBD INDUK (Rp.)	PLAFON APBD PERUBAHAN (Rp)	PERBEDAAN
1	Belanja Pegawai	883.579.664.000	913.165.273.000	29.585.609.000
2	Belanja Bunga	24.688.000	24.688.000	-
3	Belanja Subsidi	500.000.000	650.000.000	150.000.000
4	Belanja Hibah	5.934.205.000	15.926.409.000	9.992.204.000
5	Belanja Bantuan Sosial	20.173.500.000	24.525.000.000	4.351.500.000
6	Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	5.822.868.000	5.822.868.000	-
7	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	249.581.790.000	252.026.790.000	2.445.000.000
8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	-
	JUMLAH	1.167.616.715.000	1.214.141.028.000	46.524.313.000

F. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika Perubahan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan RKPD
- C. Maksud dan tujuan
- D. Dasar pertimbangan perubahan RKPD
- E. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- F. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- A. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2014 dan Realisasi Target RPJMD pada Tahun 2013
- B. Permasalahan Pembangunan Daerah.

Bab IV Prioritas, Sasaran dan program Pembangunan Daerah

- A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- B. Prioritas dan program Pembangunan Daerah

Bab VI Penutup

BAB II.

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

A. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan

Rata-rata realisasi kinerja kegiatan RKPD sampai dengan triwulan I mencapai 15,78 persen (kategori rendah), dan realisasi anggaran mencapai 10,20 persen (kategori rendah). Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian realisasi anggaran SKPD pada tahun 2016 sampai dengan triwulan I tergolong kurang baik. Rendahnya kinerja penyerapan anggaran pada trwulan I akan dapat dilakukan percepatan-percepatan pada tiga triwulan berikutnya. Diperlukan upaya optimalisasi dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD agar tidak menimbulkan SILPA dalam jumlah yang besar.

Pencapaian kinerja dan realisasi anggaran masing-masing urusan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2016
(Capaian s/d TW I)

NO	Program/Kegiatan	Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2016	
		K	Rp
1	Urusan Pendidikan	22,01	3,92
2	Urusan Kesehatan	10,25	7,56
3	Urusan Pekerjaan Umum	3,07	1,08
4	Urusan Perumahan	0,00	0,00
5	Urusan Penataan Ruang	0,00	2,18
6	Urusan Perencanaan Pembangunan	27,63	11,67
7	Urusan Perhubungan	32,66	20,77
8	Urusan Lingkungan Hidup	19,90	9,26
9	Urusan Pertanahan	0,00	0
10	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	10,18	8,53
11	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12,67	12,67
12	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	19,00	13,04

NO	Program/Kegiatan	Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2016	
		K	Rp
13	Urusan Sosial	19,24	19,24
14	Urusan Ketenagakerjaan	12,25	11,34
15	Urusan Koperasi dan UMKM	11,35	11,35
16	Urusan Penanaman Modal	4,38	0,00
17	Urusan Kebudayaan	13,08	9,74
18	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	43,06	17,36
19	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	15,37	15,15
20	Urusan Otonomi Daerah	20,73	11,88
21	Urusan Ketahanan Pangan	25,18	22
22	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21,67	21,67
23	Urusan Statistik	20,00	1,11
24	Urusan Kearsipan	17,52	12,06
25	Urusan Komunikasi dan Informatika	32,66	20,77
26	Urusan Perpustakaan	14,90	13,46
27	Urusan Pertanian	27,86	20,56
28	Urusan Kehutanan	33,75	3,96
29	Urusan Pariwisata	7,24	10,89
30	Urusan Kelautan dan Perikanan	6,36	6,36
31	Urusan Perdagangan	5,52	5,52
32	Urusan Industri	11,45	11,45
34	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00
33	Urusan Transmigrasi	0,00	0,00

Berikut ini akan disajikan perkembangan kinerja masing-masing urusan pembangunan.

1. Urusan Wajib Pendidikan

Tabel 2.1
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Pendidikan
(Capaian s/d TW I)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi s/d Triwulan I	
		K	Rp
	Urusan WAJIB Pendidikan	22,01	3,92
a.	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	30,83	7,48
b.	Program Pendidikan Usia Dini	46,67	15,86
c.	Program Pendidikan Dasar	15,67	0,63

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi s/d Triwulan I	
		K	Rp
d.	Program Pendidikan Menengah	22,78	0,39
e.	Program Pendidikan Non Formal	18,57	0,00
f.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	20,16	5,85

2. Urusan Wajib Kesehatan

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan kesehatan sampai dengan triwulan I tahun 2016 terlihat pada tabel 2.2.. Kondisi ini menunjukkan masih perlu adanya upaya peningkatan kinerja agar dapat mencapai kinerja optimal, dan perlu ada percepatan dalam penyerapan anggaran kegiatan pada triwulan berikutnya.

Tabel 2.2
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Wajib Kesehatan
(Capaian s/d TW I)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi Kinerja s/d Triwulan I	
		K	Rp
	Urusan WAJIB Kesehatan	10,25	7,56
a.	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	15,50	2,34
b.	Program Pengelolaan obat publik, Makanan, Minuman, dan Perbekalan Farmasi	6,61	6,62
c.	Program Pelayanan KIA, Remaja dan Usia Lanjut	14,00	3,49
d.	Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	5,00	1,93
e.	Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	12,11	8,32
f.	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	10,89	10,08
g.	Program Kesehatan Matra	00,00	00,00
h.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	00,00	0,03
i.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	2,33	2,40
j.	Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan	31,75	26,68

3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan pekerjaan umum sampai dengan triwulan I tahun 2016 terlihat pada tabel 2.3. Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja maupun realisasi anggaran pembangunan masih sangat kurang, sehingga perlu ditingkatkan pada triwulan selanjutnya.

Tabel 2.3
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Capaian s/d TW I)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi Kinerja s/d Triwulan I	
		K	Rp
	Urusan WAJIB Pekerjaan Umum	3,07	1,08
a.	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	36,00	0,93
b.	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0,00	0,02
c.	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Irigasi dan Pengairan	10,00	0,51
d.	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Pemerintahan	0,00	0,00
e.	Program Pengembangan dan Penataan Prasarana Perkotaan	24,00	12,00
f.	Program Pendayagunaan dan Pengembangan ketenagalistrikan	0,00	0,00
g.	Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	0,00	0,00
h.	Program Optimalisasi dan Pengendalian Pendayagunaan Potensi Geologi, Pertambangan dan Air Tanah	0,00	0,00

4. Urusan Wajib Perumahan

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan wajib perumahan sampai dengan triwulan I tahun 2016 terlihat pada tabel 2.4. Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja maupun realisasi anggaran pembangunan masih sangat kurang, sehingga perlu ditingkatkan pada triwulan selanjutnya.

Tabel 2.4
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Wajib Perumahan
(Capaian s/d TW I)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi Kinerja s/d Triwulan I	
		K	Rp
	Urusan WAJIB Perumahan	0,00	0,00
a.	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	0,00	0,00
b.	Program Penataan Lingkungan Permukiman dan Peningkatan Kualitas Sanitasi	00,00	0,00

5. Urusan Wajib Penataan Ruang

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan Penataan Ruang sampai dengan triwulan I tahun 2016 terlihat pada tabel 2.5. Kondisi ini menunjukkan masih perlu adanya upaya peningkatan kinerja agar dapat mencapai kinerja optimal, dan perlu ada percepatan dalam penyerapan anggaran kegiatan pada triwulan berikutnya.

Tabel 2.5
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Wajib Penataan Ruang (Capaian s/d TW I)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi Kinerja s/d Triwulan I	
	K	Rp
Urusan WAJIB Penataan Ruang	0,00	2,18
Program Penataan dan Pengendalian Ruang Daerah	0,00	2,18

6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan Penataan Ruang sampai dengan triwulan I tahun 2016 terlihat pada tabel 2.6. Kondisi ini menunjukkan masih perlu adanya upaya peningkatan kinerja agar dapat mencapai kinerja optimal, dan perlu ada percepatan dalam penyerapan anggaran kegiatan pada triwulan berikutnya.

Tabel 2.6
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Wajib
Perencanaan Pembangunan (Capaian s/d TW I)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi Kinerja s/d Triwulan I	
		K	Rp
	Urusan WAJIB Perencanaan Pembangunan	27,63	11,67
a.	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	17,67	13,80
b.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	39,00	8,72
c.	Program Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	22,00	13,13

7. Urusan Wajib Perhubungan

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan perhubungan sampai dengan triwulan I tahun 2016 terlihat pada tabel 2.7. Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja maupun realisasi anggaran perlu ditingkatkan pada triwulan selanjutnya.

Tabel 2.7
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Wajib
Perhubungan (Capaian s/d TW I)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi Kinerja s/d Triwulan I	
	K	Rp
Urusan WAJIB Perhubungan	32,66	20,77
Program Peningkatan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas	32,66	20,77

8. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan lingkungan hidup sampai dengan triwulan I tahun 2016 terlihat pada tabel 2.8. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja perlu dioptimalkan, dan realisasi kinerja perlu ditingkatkan pada triwulan selanjutnya.

Tabel 2.8
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Wajib Lingkungan
Hidup (Capaian s/d TW I)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi Kinerja s/d Triwulan I	
		K	Rp
	Urusan WAJIB Lingkungan Hidup	19,90	9,26
a.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	10,00	0,00
b.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	18,13	9,59
c.	Program Pernyediaan dan Penyempurnaan Data dan Informasi Daerah	5,00	0,00

9. Urusan Wajib Pertanahan

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan pertanahan sampai dengan triwulan I tahun 2016 terlihat pada tabel 2.9. Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja maupun realisasi anggaran masih perlu ditingkatkan pada triwulan selanjutnya.

Tabel 2.9
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Wajib Pertanahan
(Capaian s/d TW I)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi Kinerja s/d Triwulan I	
	K	Rp
Urusan WAJIB Pertanahan	0,00	0,00
Program Catur Tertib Pertanahan	0,00	0,00

10. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan kependudukan dan catatan sipil sampai dengan triwulan I tahun 2016 terlihat pada tabel 2.10. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran perlu ditingkatkan pada triwulan selanjutnya.

Tabel 2.10
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Wajib
Kependudukan dan Catatan Sipil (Capaian s/d TW I)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi Kinerja s/d Triwulan I	
	K	Rp
Urusan WAJIB Kependudukan dan Catatan Sipil	10,18	8,53
Program Penataan Administrasi Kependudukan	10,18	8,53

11. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan perhubungan sampai dengan triwulan I tahun 2016 terlihat pada tabel 2.11. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja perlu dioptimalkan, dan realisasi anggaran perlu ditingkatkan pada triwulan selanjutnya.

Tabel 2.11
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Wajib
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Capaian s/d TW I)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi Kinerja s/d Triwulan I	
	K	Rp
Urusan WAJIB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12,67	12,67
Program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan PA Perempuan dan Perlindungan Anak.	12,67	12,67

12. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera sampai dengan triwulan I tahun 2016 terlihat pada tabel 2.12. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja maupun realisasi anggaran perlu ditingkatkan pada triwulan selanjutnya karena capaiannya masih sangat rendah.

Tabel 2.12
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Wajib Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera (Capaian s/d TW II)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi Kinerja s/d Triwulan I	
		K	Rp
	Urusan WAJIB Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	19,00	13,04
a.	Program Pemberdayaan Keluarga	26,25	14,41
b.	Program Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Institusi KB	16,00	21,72
c.	Program Peningkatan Pelayanan, Perlindungan dan Pembinaan Kepesertaan KB.	0,00	0,00
d.	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	32,75	16,01

13. Urusan Wajib Sosial

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan sosial sampai dengan triwulan I tahun 2016 terlihat pada tabel 2.13. Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja maupun anggaran perlu dioptimalkan pada triwulan selanjutnya.

Tabel 2.13
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Wajib Sosial
(Capaian s/d TW I)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi Kinerja s/d Triwulan I	
		K	Rp
	Urusan WAJIB Sosial	19,24	19,24
a.	Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Keluarga	3,03	3,03
b.	Program Penanggulangan Bencana	37,56	37,56
c.	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	17,12	17,12

14. Urusan Wajib Ketenagakerjaan

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan ketenagakerjaan sampai dengan triwulan I tahun 2016 terlihat pada tabel 2.14. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja perlu dioptimalkan, dan realisasi anggaran perlu ditingkatkan pada triwulan selanjutnya.

Tabel 2.14
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Wajib
Ketenagakerjaan (Capaian s/d TW I)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi Kinerja s/d Triwulan I	
		K	Rp
	Urusan WAJIB Ketenagakerjaan	12,25	11,34
a.	Program Pembinaan, Peningkatan Ketram-pilan dan Penempatan Tenaga Kerja	20,18	17,45
b.	Program Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembang-an Hubungan Industrial	16,57	16,57

15. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan koperasi dan UKM sampai dengan triwulan I tahun 2016 terlihat pada tabel 2.15. Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja maupun realisasi anggaran perlu ditingkatkan pada triwulan selanjutnya.

Tabel 2.15
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Capaian s/d TW I)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi Kinerja s/d Triwulan I	
		K	Rp
	Urusan WAJIB Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	11,35	11,35
a.	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	16,00	16,00
b.	Program Penumbuhan, Pengembangan, dan Peningkatan Kualitas Manajemen Koperasi	9,42	9,42
c.	Program Penumbuhan dan Pengembangan UMKM	8,63	8,63

16. Urusan Wajib Penanaman Modal

Tabel 2.16

Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Wajib Penanaman Modal (Capaian s/d TW I)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi Kinerja s/d Triwulan I	
		K	Rp
	Urusan WAJIB Penanaman Modal Daerah	4,38	0,00
a.	Program Promosi dan Pemasaran Potensi Daerah serta Fasilitasi Investasi	0,00	0,00
b.	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	30,00	0,00
c.	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	0,00	0,00
d.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Administrasi Kearsipan	0,00	0,00

17. Urusan Wajib Kebudayaan

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan kebudayaan sampai dengan triwulan I tahun 2016 terlihat pada tabel 2.17. Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja maupun realisasi anggaran perlu ditingkatkan pada triwulan selanjutnya.

Tabel 2.17

Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Wajib Kebudayaan (Capaian s/d TW I)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi Kinerja s/d Triwulan I	
	K	Rp
Urusan WAJIB Kebudayaan	13,08	9,74
Program Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	13,08	9,74

18. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan kepemudaan dan olahraga sampai dengan triwulan I tahun 2016 terlihat pada tabel 2.18. Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja maupun realisasi anggaran perlu ditingkatkan pada triwulan selanjutnya.

Tabel 2.18
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Wajib
Kepemudaan dan Olahraga (Capaian s/d TW I)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi Kinerja s/d Triwulan I	
		K	Rp
	Urusan WAJIB Kepemudaan dan Olah Raga	43,06	17,36
a.	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Pemuda	80,29	14,15
b.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga	48,88	25,99

19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sampai dengan triwulan I tahun 2016 terlihat pada tabel 2.19 Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja maupun realisasi anggaran perlu ditingkatkan pada triwulan selanjutnya.

Tabel 2.19
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Wajib Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Capaian s/d TW I)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi Kinerja s/d Triwulan I	
		K	Rp
	Urusan WAJIB Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	15,37	15,15
a.	Program Fasilitasi dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik	3,60	3,60
b.	Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan	26,66	26,66
c.	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	26	26
d.	Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	9,43	4,71

20. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian sampai dengan triwulan I tahun 2016 terlihat pada tabel 2.20. Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja maupun realisasi anggaran perlu ditingkatkan pada triwulan selanjutnya

Tabel 2.20

Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi Kinerja s/d Triwulan I	
		K	Rp
	Urusan Wajib Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	20,73	11,88
a.	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	22,00	22,00
b.	Program Penyusunan Produk Hukumserta Pembinaan dan Pelayanan Hukum	32,36	2,56
c.	Program pengembangan Wilayah	0,00	0,00
d.	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	3,70	3,38
e.	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	19,79	19,79
f.	Program Penataan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah di Daerah	32,65	9,77
g.	Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah	17,81	4,98
h.	Program Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian	26,36	25,87
i.	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa	0,00	0,00
j.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	9,10	9,10
k.	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8,51	8,51
l.	Program Pembinaan dan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	19,38	8,35
m.	Program Pengawasan Pemerintahan dan	2,22	2,22

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi Kinerja s/d Triwulan I	
		K	Rp
	Pembangunan		
n.	Program Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian	26,36	26,36

21. Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan ketahanan pangan sampai dengan triwulan I tahun 2016 terlihat pada tabel 2.21. Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja maupun realisasi anggaran perlu ditingkatkan pada triwulan selanjutnya.

Tabel 2.21

Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Wajib Ketahanan Pangan (Capaian s/d TW I)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi Kinerja s/d Triwulan I	
		K	Rp
	Urusan WAJIB Ketahanan Pangan	25,18	22,00
a.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	23,07	14,01
b.	Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani	31,54	19,82

22. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan triwulan I tahun 2016 terlihat pada tabel 2.22. Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja maupun realisasi anggaran perlu ditingkatkan pada triwulan selanjutnya.

Tabel 2.22

Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Capaian s/d TW I)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi Kinerja s/d Triwulan I	
		K	Rp
	Urusan WAJIB Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21,67	21,67
a.	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	24,69	24,69
b.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelembagaan Masyarakat	16,59	16,59

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi Kinerja s/d Triwulan I	
		K	Rp
c.	Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat	22,30	22,30

23. Urusan Wajib Statistik

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan statistik sampai dengan triwulan I tahun 2016terlihat pada tabel 2.23. Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja perlu ditingkatkan pada triwulan selanjutnya.

Tabel 2.23
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Wajib Statistik
(Capaian s/d TW I)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi Kinerja s/d Triwulan I	
	K	Rp
Urusan WAJIB Statistik	20,00	1,11
Program Penyediaan dan Penyempurnaan Data dan Informasi Daerah	20,00	1,11

24. Urusan Wajib Kearsipan

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan kearsipan sampai dengan triwulan I tahun 2016terlihat pada tabel 2.24.Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja maupun realisasi anggaran perlu ditingkatkan pada triwulan selanjutnya.

Tabel 2.24
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Wajib Kearsipan
(Capaian s/d TW I)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi Kinerja s/d Triwulan I	
		K	Rp
	Urusan WAJIB Kearsipan	17,52	12,06
a.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Administrasi Kearsipan	6,29	5,02
b.	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	28,75	17,69

25. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan komunikasi dan informatika sampai dengan triwulan I tahun 2016 terlihat pada tabel 2.25. Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja maupun realisasi anggaran perlu ditingkatkan pada triwulan selanjutnya.

Tabel 2.25

Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika (Capaian s/d TW I)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi Kinerja s/d Triwulan I	
		K	Rp
	Urusan WAJIB Komunikasi dan Informatika	32,66	20,77
a.	Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	27,00	16,00
b.	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	33,00	29,00
c.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	11,00	10,00
d.	Program Peningkatan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas	37,00	20,00
e.	Program Peningkatan Kualitas Informasi Publik	55,00	21,00

26. Urusan Wajib Perpustakaan

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan perpustakaan sampai dengan triwulan I tahun 2016 terlihat pada tabel 2.26. Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja dan realisasi anggaran perlu dioptimalkan.

Tabel 2.26

Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Wajib Perpustakaan (Capaian s/d TW I)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi Kinerja s/d Triwulan I	
	K	Rp
Urusan WAJIB Perpustakaan	14,90	13,46
Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	14,90	13,46

27. Urusan Pilihan Pertanian

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan pilihan pertanian sampai dengan triwulan I tahun 2016 terlihat pada tabel 2.27. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja perlu sudah baik dan perlu dipertahankan pada triwulan selanjutnya.

Tabel 2.27
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Pilihan Pertanian
(Capaian s/d TW I)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi Kinerja s/d Triwulan I	
		K	Rp
	Urusan PILIHAN Pertanian	27,86	20,56
a.	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Produk Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	19,13	9,61
b.	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	41 ,95	38,42
c.	Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Peternakan	0,00	0,00
d.	Program Kesehatan Masyarakat Veteriner	0,00	0,00

28. Urusan Pilihan Kehutanan

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan pilihan kehutanan sampai dengan triwulan I tahun 2016 terlihat pada tabel 2.28. Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja perlu ditingkatkan pada triwulan selanjutnya.

Tabel 2.28
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Pilihan Kehutanan
(Capaian s/d TW I)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi Kinerja s/d Triwulan I	
		K	Rp
	Urusan PILIHAN Kehutanan	33,75	3,96
a.	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Produk Pertanian	15,00	0,00
b.	Program Perlindungan dan Konversi Sumber Daya Alam	52,50	7,91

29. Urusan Pilihan Pariwisata

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan pilihan pariwisata sampai dengan triwulan I tahun 2016 terlihat pada tabel 2.29. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran perlu ditingkatkan pada triwulan selanjutnya.

Tabel 2.29

Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Pilihan Pariwisata
(Capaian s/d TW I)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi Kinerja s/d Triwulan I	
		K	Rp
	Urusan Pilihan Pariwisata	7,24	10,89
a.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	7,24	10,89
b.	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	12,03	12,03

30. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan pilihan kelautan dan perikanan sampai dengan triwulan I tahun 2016 terlihat pada tabel 2.30. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran perlu ditingkatkan pada triwulan selanjutnya.

Tabel 2.30

Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan (Capaian s/d TW I)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi Kinerja s/d Triwulan I	
		K	Rp
	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	6,36	6,36
a.	Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	16,70	16,70
b.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	52,17	52,17
c.	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	21,29	21,29

31. Urusan Pilihan Perdagangan

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan pilihan perdagangan sampai dengan triwulan I tahun 2016 terlihat pada tabel 2.31. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja perlu dioptimalkan, dan realisasi anggaran perlu ditingkatkan pada triwulan selanjutnya.

Tabel 2.31
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Pilihan
Perdagangan (Capaian s/d TW I)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi Kinerja s/d Triwulan I	
		K	Rp
	Urusan PILIHAN Perdagangan	5,52	5,52
a.	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	11,55	11,55
b.	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	0,00	0,00
c.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan	5,02	5,58

32. Urusan Pilihan Perindustrian

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan pilihan perindustrian sampai dengan triwulan I tahun 2016 terlihat pada tabel 2.32. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja perlu dioptimalkan, dan realisasi anggaran perlu ditingkatkan pada triwulan selanjutnya.

Tabel 2.32
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Pilihan
Perindustrian (Capaian s/d TW I)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi Kinerja s/d Triwulan I	
		K	Rp
	Urusan PILIHAN Industri	11,445	11,45
a.	Program Peningkatan Kapasitas Iptek dalam Sistem Produksi Industri Kecil dan Menengah	0,00	0,00
b.	Program Pengembangan Sentra Industri Potensial	22,90	22,90

33. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan pilihan energi dan sumberdaya mineral sampai dengan triwulan I tahun

2016 terdapat pada tabel 2.33. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja perlu dioptimalkan, dan realisasi anggaran perlu ditingkatkan pada triwulan selanjutnya.

Tabel 2.33
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral(Capaian s/d TW I)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi Kinerja s/d Triwulan I	
	K	Rp
Urusan PILIHAN Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	0,00
Program Pendayagunaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Alternatif	0,00	0,00

34. Urusan Pilihan Transmigrasi

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan pilihan transmigrasi sampai dengan triwulan I tahun 2016 terlihat pada tabel 2.34. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja perlu dioptimalkan, dan realisasi anggaran perlu ditingkatkan pada triwulan selanjutnya.

Tabel 2.34
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Transmigrasi (Capaian s/d TW I)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi Kinerja s/d Triwulan I	
	K	Rp
Urusan PILIHAN Transmigrasi	0,00	0,00
Program Ketransmigrasian	0,00	0,00

B. Permasalahan Pembangunan Daerah.

1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
 - a. Masih tingginya angka kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga berdasarkan data Susenas BPS masih relatif tinggi, yaitu mencapai angka 20,05 persen pada tahun 2015, menurun

dibanding tahun 2010 sebesar 24.57 persen. Berbagai program penanggulangan kemiskinan selama ini telah dilakukan, baik yang merupakan program dari pemerintah pusat, maupun inovasi pemerintah daerah sendiri. Walaupun belum menunjukkan perbaikan yang signifikan, upaya penanggulangan kemiskinan tersebut tetap terus dilakukan secara sinergis dan simultan dengan dikoordinir oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Purbalingga.

Dalam upaya pengentaskan kemiskinan, segala sumberdaya yang dimiliki harus difungsikan secara optimal, disertai dengan kerja keras, konsisten, terkoordinasi, serta terus menggali inovasi baru maupun dengan merevitalisasi program-program yang selama ini telah dijalankan. Meskipun pertumbuhan ekonomi sudah dapat ditingkatkan, namun pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Pengaruh faktor makro ekonomi yang tidak dapat dikendalikan daerah seperti misalnya adanya rencana kebijakan pemerintah pusat untuk menaikkan harga bahan bakar minyak mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok, sangat berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Berdasarkan data BPS, angka paritas daya beli (PPP) Kabupaten Purbalingga tahun 2014 sebesar Rp 634.440,-. Walaupun mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar Rp 631.040,- akan tetapi angka tersebut termasuk rendah apabila dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah yakni Rp 640.410,-. Faktor eksternal lain adalah kejadian bencana alam yang secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi masyarakat Purbalingga. Masalah pokok yang dihadapi dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin antara lain sebagai berikut :

- 1). Harga bahan kebutuhan pokok terutama beras cenderung selalu naik sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat miskin. Di sisi lain kemampuan produksi pertanian dan peternakan, utamanya jagung, kedelai, gandum, buah-buahan, daging, dan susu belum dapat menjamin

permintaan dan kebutuhan masyarakat sehingga tergantung dari impor.

2). Akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi masih terbatas. Hal ini disebabkan terutama oleh cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum memadai. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim-piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih jauh dari memadai.

b. Kurangnya kesempatan kerja khususnya bagi laki-laki

Angka pengangguran di Kabupaten Purbalingga tahun 2013 yang relatif rendah yakni 3,82 persen, mengalami kenaikan pada tahun 2014 menjadi 5,54 persen. Meskipun angka ini masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 6,21 persen, namun demikian masalah pengangguran tetap harus mendapatkan perhatian yang serius. Perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha harus terus dilakukan utamanya untuk tenaga kerja laki-laki. Salah satu upaya menciptakan lapangan kerja baru adalah melalui implementasi kebijakan dan program pembangunan yang pro investasi berupa deregulasi perijinan usaha dan investasi guna menjadikan Kabupaten Purbalingga sebagai daerah yang prospektif untuk berinvestasi.

c. Kesenjangan antar wilayah

Pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini ternyata masih menyisakan berbagai permasalahan yang harus diselesaikan, antara lain adanya ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat baik antar individu maupun antar wilayah. Hal tersebut di samping disebabkan perbedaan kondisi geografis dan potensi sumber daya antar wilayah juga disebabkan karena terbatasnya ketersediaan infrastruktur sosial dan ekonomi pada wilayah-wilayah tertentu yang menyebabkan ketimpangan akses masyarakat terhadap sumberdaya sosial dan ekonomi.

d. Kualitas pembangunan manusia.

Pada tataran formal, upaya pembangunan manusia di Kabupaten Purbalingga masih harus terus ditingkatkan. Ukuran yang umum digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi tiga komponen yaitu tingkat kesehatan (angka harapan hidup), tingkat pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta tingkat kemampuan ekonomi masyarakat yang diukur dari paritas daya beli. Pada tahun 2014 capaian IPM kembali meningkat menjadi 72.50.

e. Derajat kesehatan masyarakat masih rendah

Target SPM 2015 dimana seluruh masyarakat miskin di Kabupaten Purbalingga harus memperoleh pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan merupakan permasalahan yang harus diantisipasi mengingat saat ini belum adanya data yang valid dan akurat mengenai jumlah masyarakat miskin *by name by address by case* yang telah terlayani maupun belum terlayani jaminan pelayanan dasar termasuk pelayanan kesehatan. Adanya epidemi HIV-AIDS di Kabupaten Purbalingga yang cukup tinggi juga merupakan permasalahan yang harus segera dituntaskan. Sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini selalu terjadi peningkatan penemuan kasus setiap tahunnya. Pada tahun 2006 terdapat 2 kasus HIV/AIDS, dan meningkat menjadi 6 kasus pada tahun 2011. Pada tahun 2013 kembali meningkat menjadi 20 kasus HIV/AIDS dan 6 diantaranya sudah meninggal. Dengan adanya hal tersebut, dikhawatirkan terdapat fenomena gunung es pada kasus epidemi HIV-AIDS di Kabupaten Purbalingga, sehingga diperlukan upaya maksimal guna mengendalikan epidemi HIV-AIDS, di sisi lain perlunya penanganan profesional pada penderita yang telah terjangkit HIV-AIDS.

Selanjutnya rendahnya proporsi rumah tangga dengan akses air bersih di Kabupaten Purbalingga dan tingginya proporsi rumah tangga tanpa akses sanitasi dasar yang layak merupakan permasalahan lain yang dijumpai dan berpengaruh besar terhadap kualitas kesehatan masyarakat

Kabupaten Purbalingga. Permasalahan kesehatan lainnya adalah perilaku hidup bersih dan sehat yang belum sepenuhnya membudaya pada masyarakat. Berdasarkan data pemetaan PHBS tatanan rumah tangga menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang ber - PHBS sebanyak 186.519 atau 73 persen, sedangkan sisanya sebanyak 68.493 rumah tangga atau 27 persen termasuk kategori rumah tangga belum ber - PHBS. kepemilikan sarana sanitasi dasar juga masih cukup rendah. Sarana sanitasi dasar dimaksud antara lain cakupan kepemilikan jamban sehat baru mencapai 61,1 persen, kepemilikan tempat sampah 77,3 persen, dan kepemilikan pengelolaan air limbah baru sebesar 54,2 persen.

f. Kualitas pendidikan masih rendah

Permasalahan pendidikan yang masih mengemuka pada tahun 2015 adalah rendahnya angka partisipasi sekolah khususnya SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat, cukup tingginya angka putus sekolah penduduk 7 - 15 tahun, masih relatif tingginya angka buta huruf penduduk usia 10 tahun ke atas, penduduk yang tidak bisa baca tulis sejumlah 5.96 persen, masih banyaknya kerusakan sarana/prasarana khususnya pada tingkat pendidikan dasar, relatif tingginya kerusakan sarana/prasarana pendidikan dasar pada sekolah swasta di perdesaan, masih relatif rendahnya kualitas pendidikan dan layanan pendidikan bagi masyarakat yang diindikasikan dengan skor nilai IPM yang relatif rendah, termasuk juga belum adanya dukungan ketersediaan data pendidikan yang valid dan akurat guna merumuskan arah kebijakan dan evaluasi bidang pendidikan. Tantangan bidang pendidikan semakin besar karena banyaknya prasarana dan sarana serta instrumen yang harus dipersiapkan guna mencapai SPM bidang pendidikan dasar sesuai dengan Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010. Rencana pencapaian target SPM bidang pendidikan dasar berserta rencana pemenuhan dan kerangka pendanaannya menjadi hal yang mendesak dan apabila tidak segera diurusutamakan akan menimbulkan permasalahan dalam pencapaiannya.

g. Kependudukan dan keluarga berencana

Permasalahan Keluarga Berencana masih cukup besar yakni dengan posisi laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi bila dibanding dengan laju pertumbuhan Propinsi Jawa Tengah. Bila dilihat dari aspek pelayanan petugas yakni proporsi antara pembina dengan wilayah binaan sebesar 69 : 239, atau 1 : 3,5. Apabila dikomparasikan dengan target SPM tahun 2015, rasio petugas pembina dengan wilayah binaan yakni 1 (satu) PKB/PLKB membina 2 desa/kelurahan maka saat ini perlu adanya penambahan jumlah Pembina dan optimalisasi petugas / Pembina yang ada. Permasalahannya lainnya adalah sebagian besar peserta KB menggunakan alat kontrasepsi hormonal sehingga menyebabkan tingginya kebutuhan anggaran yang disediakan untuk penyediaan alat kontrasepsi, dan relatif rendahnya kepesertaan KB laki-laki.

h. Pertanian dalam arti luas

Kecenderungan semakin berkurangnya lahan pertanian sementara jumlah penduduk terus bertambah menyebabkan kepemilikan lahan pertanian semakin kecil. Hal ini menyebabkan produksi pertanian tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga petani. Keluarga petani mencari tambahan penghasilan di sektor lain. Akibatnya banyak lahan pertanian tidak digarap intensif dan produksinya berkurang. Alih fungsi lahan juga meningkatkan jumlah buruh tani. Permasalahan lainnya antara lain adalah masih tingginya penggunaan pupuk kimia dan pestisida dan perlunya peningkatan infrastruktur pengairan.

BAB IV.

PRIORITAS, SASARAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Visi dan Misi Bupati terpilih Tahun 2016-2021

Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 merupakan pokok-pokok kebijakan pembangunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran tahunan. Prioritas ini akan diuraikan dalam indikasi program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun ketiga dari rencana pembangunan lima tahunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, dimana substansinya merupakan penjabaran dari Visi Misi Bupati terpilih periode 2016-2021.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 merupakan tahun transisi perencanaan jangka menengah dan merupakan tahun pertama Kepemimpinan Bupati periode 2016-2021 dan RPJMD 2016-2021 masih dalam proses penyusunan sehingga RKPD perubahan tahun 2016 disusun bersama-sama dengan proses penyusunan RPJMD.

Visi Bupati Purbalingga Tahun 2016-2021 adalah "PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA".

Makna yang termuat dalam visi pembangunan Kabupaten Purbalingga tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Maksud dari Visi "**Purbalingga yang mandiri**" adalah bahwa dengan keuletan dan kerja keras, seluruh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan guna meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat, dan kemajuan daerah. Hal ini dilakukan melalui strategi, kreasi, dan inovasi yang diciptakan dan dikembangkannya sendiri, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar ketergantungan terhadap pihak lain secara bertahap dapat dikurangi.

Maksud dari **“Purbalingga yang berdaya saing”** adalah bahwa dengan kemajuan dan kemandiriannya tidak menjadikan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan masyarakat mengisolasi diri dari pengaruh dan perkembangan peradaban, serta dinamika lingkungan, melainkan senantiasa berupaya meningkatkan kemampuan dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki sehingga mampu mengikuti dinamika dan mampu bersaing di era otonomi dan globalisasi.

Maksud dari **“Purbalingga yang sejahtera”** yaitu bahwa tujuan akhir dari pembangunan yang dilaksanakan adalah mewujudkan masyarakat Purbalingga yang sejahtera. Sejahtera yang dimaksud disamping terpenuhinya kebutuhan yang bersifat fisiologis dan material, juga mencakup kebutuhan yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih, serta harga diri (mampu, mandiri, kompeten, reputasi, prestise, dan apresiasi) dan kebutuhan untuk aktualisasi diri.

Maksud dari **“berakhlak mulia”** adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Sedangkan Misi Bupati Purbalingga Tahun 2016-2021 adalah :

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat
- 2) Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan
- 3) Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak

- 4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
- 5) Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja
- 6) Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai
- 7) Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup

Dengan memperhatikan visi-misi Bupati Purbalingga terpilih dan mempertimbangkan capaian hasil pembangunan pada tahun tahun sebelumnya dan dengan mempertimbangkan isu dan permasalahan mendesak yang masih akan dihadapi pada tahun 2016, sebagai arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 ditetapkan dengan tema sebagai berikut "MEMPERKOKOH LANDASAN UNTUK MEWUJUDKAN VISI KABUPATEN PURBALINGGA MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEMAKIN LAYAK DAN BERMARTABAT DENGAN MEMBERIKAN PERHATIAN UTAMA PADA PEMENUHAN HAK DASAR RAKYAT DENGAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI"

2. Prioritas dan Program Pembangunan

Berdasarkan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga terpilih Tahun 2016 - 2021, maka disusunlah prioritas pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016. Prioritas RKPD Tahun 2016 merupakan pelaksanaan tahun transisi perencanaan sebelum dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021

ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Prioritas tersebut adalah sebagai berikut :

a. Perwujudan Landasan/Fundamental yang kokoh untuk pelaksanaan Pembangunan melalui :

- 1) Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dengan fokus pada perbaikan manajemen kinerja. Bahwa perencanaan dan anggaran tidak lagi berprinsip *money follow function* tetapi menjadi *money follow program*.
- 2) Mendorong Terciptanya kehidupan yang religius/agamis, serta mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat
- 3) Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (utamanya pangan dan papan) dengan fokus pada penyediaan ketercukupan pangan yang murah, aman dan bergizi serta penyediaan pangan dan rumah layak huni bagi warga miskin setiap tahunnya sampai kebutuhan fundamental ini tercukupi.

b. Penegakan dan pelaksanaan empat pilar pembangunan

- 1) Pilar pembangunan kualitas manusia utamanya melalui pelayanan pendidikan umum dan keagamaan serta kesehatan berkualitas dengan fokus
 - Terjaminnya akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas dan peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan yang berkualitas serta menyediakan kebutuhan sekolah bagi anak usia sekolah tidak sekolah (Kartu Purbalingga Pintar)
 - Jaminan masyarakat dalam mengakses kesehatan gratis bagi warga miskin, peningkatan pelayanan kesehatan dasar
 - Peningkatan akses layanan kesehatan dengan tujuan agar seluruh masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan merata revitalisasi posyandu/ posdaya; penyediaan prasarana,

sarana, dan tenaga kesehatan secara memadai di seluruh wilayah.

- Pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin serta revitalisasi peran kader KB.

2) Pilar Pembangunan Perdesaan dengan fokus pada pemantapan otonomi desa melalui penguatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan desa dan aparat pemerintah desa dalam rangka memantapkan desentralisasi pembangunan desa dan desentralisasi pengelolaan anggaran desa. Selain itu pembangunan perdesaan didorong untuk tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan baru yang memanfaatkan potensi lokal kawasan perdesaan seperti desa wisata maupun desa organik.

3) Pilar Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan fokus pada :

- Pelaksanaan keberpihakan (*affirmatif action*), terutama terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan, perlindungan petani dan UMKM, peningkatan keadilan bagi semua serta pembangunan usaha mikro dan usaha kecil serta industri kreatif.
- Pengembangan komoditas unggul sesuai potensi agroekologis. Optimalisasi pendayagunaan potensi sumber daya alam lokal bagi usaha pertanian. Pengembangan dan penguatan industri padat karya dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang memiliki nilai tambah tinggi dan ramah lingkungan untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.
- Penciptaan lingkungan bisnis (*business environment*) yang semakin kondusif untuk meningkatkan kegiatan usaha dan investasi dengan menitikberatkan pada peningkatan kinerja pelayanan perijinan.

- Peningkatan keterampilan dan peningkatan akses tenaga kerja terhadap lapangan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan hubungan industrial.
 - Pengembangan dan peningkatan kapasitas serta kualitas destinasi wisata.
- 4) Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur pertanian dengan fokus pada revitalisasi saluran irigasi dan pembangunan saluran irigasi utamanya saluran irigasi dari Bendung Slinga sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan daerah khususnya dan sebagai penyangga pangan nasional.
- 5) Pilar Penyediaan Infrastruktur, dengan fokus :
- Peningkatan aksesibilitas seluruh wilayah, terutama dalam mendukung pariwisata serta mendorong keserasian pertumbuhan antarwilayah dan menciptakan kawasan pusat pertumbuhan baru dan percepatan pengembangan wilayah-wilayah cepat tumbuh.
 - Pengembangan infrastruktur dan sarana transportasi massa yang cepat dan efisien.
- c. Pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan dengan fokus pada :
- Pengendalian gas rumah kaca dan kerusakan lingkungan serta pencegahan eksploitasi sumberdaya lingkungan.
 - Pelestarian sumber daya genetik (kekayaan plasma nutfah).
- d. Dukungan Sektor-sektor Pembangunan Lain secara sinergis. Fokus dari sinergitas ini ditujukan dalam rangka efesiensi dan efektifitas sumberdaya dalam mewujudkan masyarakat Purbalingga yang sejahtera.

Berdasarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021, maupun perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional dan nasional, serta dengan memperhatikan kondisi umum dan

permasalahan yang dihadapi hingga saat ini, yang diformulasikan dalam hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2015, maka dalam rangka penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah untuk Tahun 2016 disusun program pembangunan daerah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016. Rencana program pembangunan daerah yang tercakup dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan ini pada dasarnya merupakan kerangka operasional sebagai arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran.

Pada Perubahan RKPD tahun 2016, rencana program dan kegiatan pembangunan daerah disusun didasarkan pada evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan rancangan kerangka ekonomi daerah, sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab II dan Bab III. Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan pada Perubahan RKPD tahun 2016 beserta tolak ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai urusan pemerintah daerah dan Perangkat Daerah (PD), diuraikan secara detail pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Pagu Indikatif Berdasarkan Urusan dan SKPD

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	APBD INDUK 2016	PAGU INDIKATIF TAHUN 2016
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.465.169.000	3.324.504.250
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.465.169.000	3.324.504.250
Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.359.300.000	1.354.159.000
Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil	320.382.000	285.153.000
Pelayanan Keliling Dokumen Kependudukan	60.000.000	60.000.000
Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan	329.000.000	225.875.000
Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data	110.056.000	110.056.000
Pencatatan Peristiwa Kelahiran dalam Register	20.000.000	20.000.000
Pencetakan KTP Elektronik	259.953.000	373.678.000
Pengelolaan dan Penataan Arsip Dokumen Akta Pencatatan Sipil	196.539.000	-
Penyusunan Profil Kependudukan	28.900.000	28.900.000
Percepatan Perekaman KTP el		216.027.000
Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	34.470.000	34.470.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	1.105.869.000	1.970.345.250
Pembuatan Skat Dinding dan Garasi Dinducapil (pindahan Kantor)		144.000.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	251.104.000	249.897.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	20.000.000	20.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	420.005.000	953.930.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	309.760.000	477.518.250
Penyusunan Data Base Kependudukan		
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	105.000.000	125.000.000
Energi dan Sumberdaya Mineral	375.000.000	75.000.000
Dinas Pekerjaan Umum	375.000.000	75.000.000
Program Optimalisasi dan Pengendalian Pendayagunaan Potensi Geologi, Pertambangan	375.000.000	75.000.000
Inventarisasi Potensi Air Tanah di Kabupaten Purbalingga	150.000.000	
Pemetaan Daerah Rawan Bencana Gerakan Tanah di Kabupaten Purbalingga	150.000.000	
Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Sektor dan Sumberdaya Mineral	75.000.000	75.000.000
FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH	73.429.465.000	100.016.097.511
Badan Kepegawaian Daerah	4.086.356.000	4.183.939.840
Pemutakhiran Program dan Data SIMPEG	13.439.000	13.439.000
Elektronik Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil	13.439.000	13.439.000
Program Pembinaan dan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	2.969.583.000	2.890.206.000
Diklat Pegawai	1.520.169.000	1.219.169.000
Diklat Pra Jabatan CPNS	665.443.000	665.443.000
Fasilitasi Masalah Kepegawaian	14.430.000	14.430.000
Fasilitasi Ujian Dinas dan Kenaikan Pangkat Pilihan	13.109.000	13.109.000
Fit and Proper Test PNS Mutasi ke Purbalingga	16.743.000	18.711.000
Pengadaan CPNS	408.304.000	393.904.000
Pengelolaan Administrasi PTT	6.026.000	6.106.000
Peningkatan Administrasi Kepegawaian dan Pemantauan Disiplin PNS	95.337.000	175.337.000
Penyusunan Formasi PNS	61.228.000	73.953.000
Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan	168.794.000	310.044.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	933.555.000	1.039.262.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	209.288.000	217.848.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	139.300.000	145.640.000
Peningkatan Kapasitas Kompetensi PNS BKD		78.550.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	445.497.000	411.859.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	13.550.000	13.550.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	125.920.000	171.815.000
Program Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian	169.779.000	241.032.840
Fasilitasi Pengurusan Administrasi Mutasi PNS	4.910.000	17.096.000
Fasilitasi Pengurusan Administrasi Pensiun	17.683.000	25.593.000
Iuran BPJS Ketenagakerjaan PTT		20.139.840
Pembinaan Berkala Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Unit Kerja	30.950.000	30.950.000
Pemutakhiran Program dan Data SIMPEG	15.800.000	15.800.000
Penataan File Kepegawaian	10.000.000	10.000.000
Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional	13.687.000	28.087.000
Pengelolaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala	10.250.000	11.080.000
Pengelolaan Data Kepegawaian Berbasis Internet		10.000.000
Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS	42.785.000	48.573.000
Penyusunan Buku Profil PNS	17.914.000	17.914.000
Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	5.800.000	5.800.000
Bappeda	3.778.936.000	4.061.144.000
Program Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.579.343.000	1.677.074.000
Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015	-	-
Evaluasi RKPD Tahun 2016	90.000.000	81.950.000

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	APBD INDUK 2016	PAGU INDIKATIF TAHUN 2016
Fasilitasi dan Pelaporan TP, DAK, dan Bangub	72.500.000	72.500.000
Fasilitasi FEDEP	120.000.000	120.000.000
Fasilitasi Green Economy and Locally Appropriate Mitigation Action In Indonesia (144.600.000	135.801.000
Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata	171.000.000	171.000.000
Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Ban Gub)	223.100.000	223.100.000
Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) (Bangub)	-	50.000.000
Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi	50.000.000	50.000.000
Monitoring dan Evaluasi Bidang Energi, Sumberdaya Mineral, Lingkungan Hidup d	25.000.000	25.000.000
Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100.000.000	100.000.000
Pendampingan Program Nasional Bidang Keciaptakarya	75.000.000	74.180.000
Pendampingan Program WISMP	215.000.000	215.000.000
Pendampingan Program-program Pemberdayaan Masyarakat	60.000.000	60.000.000
Pendidikan Untuk Semua (Ban Gub)	-	65.000.000
WISMP	233.143.000	233.543.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	1.157.409.000	1.384.861.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	301.852.000	349.112.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	20.000.000	20.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	239.350.000	262.350.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	365.297.000	433.704.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	20.000.000	20.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	210.910.000	299.695.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.042.184.000	999.209.000
Fasilitasi SIMRENDAS	70.000.000	70.000.000
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Perencana	40.000.000	40.000.000
Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2016	70.000.000	62.770.000
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 2015-2020	150.000.000	114.255.000
Penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2016	75.000.000	75.000.000
Penyusunan KUA PPAS Tahun 2017	100.554.000	100.554.000
Penyusunan Pedoman Tatakelola Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Tahu	15.630.000	15.630.000
Penyusunan RKPD Perubahan 2016	100.000.000	100.000.000
Penyusunan RKPD Tahun 2017	140.000.000	140.000.000
Penyusunan RPJMD 2016 - 2020	281.000.000	281.000.000
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	8.965.025.000	9.569.991.000
Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	2.618.789.000	2.703.840.000
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	246.146.000	266.793.000
Operasional Pengelolaan PBB	1.175.428.000	1.195.868.000
Pemutakhiran Data Obyek Subyek PBB-P2	185.906.000	213.971.000
Percepatan Pelunasan PBB	1.011.309.000	1.027.208.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	3.472.421.000	3.993.792.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	853.684.000	833.684.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	20.000.000	20.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	519.850.000	519.850.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	1.937.166.000	2.433.203.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	24.666.000	10.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	117.055.000	177.055.000
Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.873.815.000	2.872.359.000
Fasilitasi Kegiatan Perimbangan Keuangan	77.416.000	36.000.000
Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah	311.759.000	311.759.000
Pembinaan Berkala Bendahara Daerah	105.728.000	95.728.000
Pengamanan Aset Daerah	903.672.000	903.672.000
Pengelolaan Aset Daerah	232.092.000	232.092.000
Penyusunan APBD	260.991.000	260.991.000
Penyusunan dan Implementasi SIM Penganggaran Daerah	169.750.000	169.750.000
Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	331.288.000	331.288.000
Penyusunan Perubahan APBD	271.417.000	271.417.000
Penyusunan Sistem dan Prosedur Tata Usaha Keuangan	69.067.000	69.027.000
Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Aset	140.635.000	190.635.000
Inspektorat	1.741.748.000	2.611.920.000
Program Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan	1.014.154.000	1.281.724.000
Implementasi SPIP	70.722.000	70.722.000
Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) PNS	6.070.000	6.070.000
Penetapan Zona Integritas Bebas Korupsi	31.870.000	31.870.000
Pengawasan Internal Secara Berkala dan Penanganan Kasus/Khusus	537.306.000	697.306.000
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	20.656.000	20.656.000
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pemeriksa	35.250.000	117.660.000
Tes Uji Laboratorium	100.000.000	87.960.000
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan	212.280.000	249.480.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	727.594.000	1.330.196.000
Pembangunan Taman dan awning		51.120.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	257.635.000	605.635.000

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	APBD INDUK 2016	PAGU INDIKATIF TAHUN 2016
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	50.000.000	50.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	94.500.000	257.050.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	166.695.000	207.627.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	158.764.000	158.764.000
Kecamatan Bobotsari	409.855.000	1.010.855.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelembagaan Masyarakat	-	16.000.000
Pendampingan KPMD (Bangub)	-	16.000.000
Program Pengembangan Wilayah	62.840.000	92.840.000
Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	62.840.000	92.840.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	347.015.000	902.015.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	102.490.000	102.490.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	93.000.000	293.000.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	96.760.000	96.760.000
Penyelesaian Paving Kecamatan Bobotsari		150.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	49.765.000	54.765.000
Rehabilitasi Rumah Dinas Eks Wedana Bobotsari		200.000.000
Kecamatan Bojongsari	258.805.000	6.465.685.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelembagaan Masyarakat	-	13.000.000
Pendampingan KPMD (Bangub)	-	13.000.000
Program Pengembangan Wilayah	51.234.000	81.234.000
Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	51.234.000	81.234.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	207.571.000	6.371.451.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	55.326.000	55.326.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	35.500.000	35.500.000
Pengadaan Tanah Kecamatan Bojongsari		6.158.880.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	103.651.000	103.651.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	3.094.000	3.094.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	10.000.000	15.000.000
Kecamatan Bukateja	250.275.000	299.275.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelembagaan Masyarakat	-	14.000.000
Pendampingan KPMD (Bangub)	-	14.000.000
Program Pengembangan Wilayah	54.135.000	84.135.000
Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	54.135.000	84.135.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	196.140.000	201.140.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	60.282.000	60.282.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	46.950.000	46.950.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	69.708.000	69.708.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	4.000.000	4.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	15.200.000	20.200.000
Kecamatan Kaligondang	302.918.000	355.918.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelembagaan Masyarakat	-	18.000.000
Pendampingan KPMD (Bangub)	-	18.000.000
Program Pengembangan Wilayah	57.330.000	87.330.000
Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	57.330.000	87.330.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	245.588.000	250.588.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	74.736.000	74.736.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	43.100.000	43.100.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	110.067.000	110.067.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	4.000.000	4.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	13.685.000	18.685.000
Kecamatan Kalimanah	412.826.000	461.826.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelembagaan Masyarakat	-	14.000.000
Pendampingan KPMD (Bangub)	-	14.000.000
Program Pengembangan Wilayah	55.580.000	85.580.000
Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	55.580.000	85.580.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	357.246.000	362.246.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	186.655.000	186.655.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	43.370.000	43.370.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	102.851.000	102.851.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	4.000.000	4.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	20.370.000	25.370.000
Kecamatan Karanganyar	302.851.000	750.851.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelembagaan Masyarakat	-	13.000.000
Pendampingan KPMD (Bangub)	-	13.000.000
Program Pengembangan Wilayah	45.502.000	75.502.000
Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	45.502.000	75.502.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	257.349.000	662.349.000
Pembangunan Pagar Keliling dan Paving Kecamatan Karanganyar		200.000.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	89.729.000	89.729.000

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	APBD INDUK 2016	PAGU INDIKATIF TAHUN 2016
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	68.045.000	268.045.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	75.815.000	75.815.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	4.000.000	4.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	19.760.000	24.760.000
Kecamatan Karangjambu	268.874.000	727.874.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelembagaan Masyarakat	-	6.000.000
Pendampingan KPMD (Bangub)	-	6.000.000
Program Pengembangan Wilayah	44.711.000	74.711.000
Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	44.711.000	74.711.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	224.163.000	647.163.000
Pematangan Lahan Lingkungan Kecamatan Karangjambu		168.000.000
Pembanugnan Talud Lingkungan Kecamatan Karangjambu		200.000.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	95.429.000	145.429.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	29.500.000	29.500.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	68.154.000	68.154.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	4.000.000	4.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	27.080.000	32.080.000
Kecamatan Karangmoncol	319.686.000	365.686.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelembagaan Masyarakat	-	11.000.000
Pendampingan KPMD (Bangub)	-	11.000.000
Program Pengembangan Wilayah	46.485.000	76.485.000
Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	46.485.000	76.485.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	273.201.000	278.201.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	72.158.000	72.158.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	76.350.000	76.350.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	94.238.000	94.238.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	4.000.000	4.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	26.455.000	31.455.000
Kecamatan Karangreja	418.956.000	675.956.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelembagaan Masyarakat	-	7.000.000
Pendampingan KPMD (Bangub)	-	7.000.000
Program Pengembangan Wilayah	45.343.000	75.343.000
Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	45.343.000	75.343.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	373.613.000	593.613.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	265.201.000	265.201.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	16.000.000	31.000.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	62.302.000	62.302.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	4.000.000	4.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	26.110.000	31.110.000
Rehabilitasi Pendopo Kec. Karangreja		200.000.000
Kecamatan Kejobong	305.552.000	703.552.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelembagaan Masyarakat	-	13.000.000
Pendampingan KPMD (Bangub)	-	13.000.000
Program Pengembangan Wilayah	58.855.000	88.855.000
Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	58.855.000	88.855.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	246.697.000	601.697.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	85.393.000	85.393.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	51.600.000	251.600.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	79.184.000	79.184.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	4.000.000	4.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	26.520.000	31.520.000
Rehabilitasi Pendopo Kec. Kejobong		150.000.000
Kecamatan Kemangkon	485.887.000	964.887.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelembagaan Masyarakat	-	19.000.000
Pendampingan KPMD (Bangub)	-	19.000.000
Program Pengembangan Wilayah	64.685.000	94.685.000
Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	64.685.000	94.685.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	421.202.000	851.202.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	297.145.000	297.145.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	15.250.000	240.250.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	86.807.000	86.807.000
Penyelesaian Penataan Kecamatan Kemankon		200.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	4.000.000	4.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	18.000.000	23.000.000
Kecamatan Kertanegara	320.915.000	1.866.915.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelembagaan Masyarakat	-	11.000.000
Pendampingan KPMD (Bangub)	-	11.000.000
Program Pengembangan Wilayah	67.402.000	97.402.000
Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	67.402.000	97.402.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	253.513.000	1.758.513.000

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	APBD INDUK 2016	PAGU INDIKATIF TAHUN 2016
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	74.506.000	74.506.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	63.050.000	63.050.000
Pengadaan Tanah Kecamatan Kertanegara		1.500.000.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	90.009.000	90.009.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	4.000.000	4.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	21.948.000	26.948.000
Kecamatan Kutasari	289.752.000	538.752.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelembagaan Masyarakat	-	14.000.000
Pendampingan KPMD (Bangub)	-	14.000.000
Program Pengembangan Wilayah	65.970.000	95.970.000
Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	65.970.000	95.970.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	223.782.000	428.782.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	94.531.000	94.531.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	39.900.000	39.900.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	70.651.000	70.651.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	3.440.000	3.440.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	15.260.000	20.260.000
Rehabilitasi Kantor Kec. Kutasari Bagian Belakang		200.000.000
Kecamatan Mrebet	278.016.000	332.016.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelembagaan Masyarakat	-	19.000.000
Pendampingan KPMD (Bangub)	-	19.000.000
Program Pengembangan Wilayah	31.755.000	61.755.000
Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	31.755.000	61.755.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	246.261.000	251.261.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	70.430.000	70.430.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	64.650.000	64.650.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	96.126.000	96.126.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	15.055.000	20.055.000
Kecamatan Padamara	463.555.000	711.555.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelembagaan Masyarakat	-	13.000.000
Pendampingan KPMD (Bangub)	-	13.000.000
Program Pengembangan Wilayah	64.686.000	94.686.000
Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	64.686.000	94.686.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	398.869.000	603.869.000
Pembangunan Kantor Kecamatan Padamara (lanjutan)		200.000.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	60.080.000	60.080.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	222.050.000	222.050.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	95.559.000	95.559.000
Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja Setda	4.000.000	4.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	17.180.000	22.180.000
Kecamatan Pengadegan	470.731.000	917.912.871
Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelembagaan Masyarakat	-	9.000.000
Pendampingan KPMD (Bangub)	-	9.000.000
Program Pengembangan Wilayah	43.040.000	73.040.000
Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	43.040.000	73.040.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	427.691.000	835.872.871
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	78.985.000	78.985.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	240.100.000	440.100.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	82.606.000	82.606.000
Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja Setda	4.000.000	4.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	22.000.000	27.000.000
Rehabilitasi Pagar Depan Kec. Pengadegan		203.181.871
Kecamatan Purbalingga	333.956.000	270.956.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelembagaan Masyarakat	-	2.000.000
Pendampingan KPMD (Bangub)	-	2.000.000
Program Pengembangan Wilayah	44.398.000	74.398.000
Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	44.398.000	74.398.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	289.558.000	194.558.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	58.008.000	58.008.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	135.900.000	35.900.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	82.200.000	82.200.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	10.450.000	15.450.000
Kecamatan Rembang	487.655.000	534.655.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelembagaan Masyarakat	-	12.000.000
Pendampingan KPMD (Bangub)	-	12.000.000
Program Pengembangan Wilayah	50.600.000	80.600.000
Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	50.600.000	80.600.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	437.055.000	442.055.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	288.583.000	288.583.000

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	APBD INDUK 2016	PAGU INDIKATIF TAHUN 2016
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	36.633.000	36.633.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	86.829.000	86.829.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	4.000.000	4.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	21.010.000	26.010.000
Kelurahan Bancar	220.960.000	220.960.000
Program Pengembangan Wilayah	144.194.000	144.194.000
Pengembangan Wilayah Kelurahan	144.194.000	144.194.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	76.766.000	76.766.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	30.596.000	30.596.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	7.732.000	7.732.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	31.653.000	31.653.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	6.785.000	6.785.000
Kelurahan Bojong	233.631.000	433.631.000
Program Pengembangan Wilayah	145.481.000	145.481.000
Pengembangan Wilayah Kelurahan	145.481.000	145.481.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	88.150.000	288.150.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	31.076.000	31.076.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	23.000.000	23.000.000
Pengembangan Kantor Kelurahan Bojong		200.000.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	28.084.000	28.084.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	5.990.000	5.990.000
Kelurahan Kalikabong	437.841.000	437.841.000
Program Pengembangan Wilayah	166.112.000	166.112.000
Pengembangan Wilayah Kelurahan	166.112.000	166.112.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	271.729.000	271.729.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	214.747.000	214.747.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	16.500.000	16.500.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	34.482.000	34.482.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	6.000.000	6.000.000
Kelurahan Kandanggampang	250.954.000	250.954.000
Program Pengembangan Wilayah	143.714.000	143.714.000
Pengembangan Wilayah Kelurahan	143.714.000	143.714.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	107.240.000	107.240.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	18.165.000	18.165.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	34.583.000	34.583.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	48.982.000	48.982.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	5.510.000	5.510.000
Kelurahan Karangmanyar	241.818.000	241.818.000
Program Pengembangan Wilayah	138.754.000	138.754.000
Pengembangan Wilayah Kelurahan	138.754.000	138.754.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	103.064.000	103.064.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	35.921.000	35.921.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	15.000.000	15.000.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	44.743.000	44.743.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	7.400.000	7.400.000
Kelurahan Karangsentul	231.038.000	231.038.000
Program Pengembangan Wilayah	140.246.000	140.246.000
Pengembangan Wilayah Kelurahan	140.246.000	140.246.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	90.792.000	90.792.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	25.125.000	25.125.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	30.800.000	30.800.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	29.867.000	29.867.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	5.000.000	5.000.000
Kelurahan Kedungmenjangan	227.668.000	227.668.000
Program Pengembangan Wilayah	137.574.000	137.574.000
Pengembangan Wilayah Kelurahan	137.574.000	137.574.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	90.094.000	90.094.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	18.042.000	18.042.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	36.600.000	36.600.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	28.952.000	28.952.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	6.500.000	6.500.000
Kelurahan Kembaran Kulon	256.515.000	256.515.000
Program Pengembangan Wilayah	136.434.000	136.434.000
Pengembangan Wilayah Kelurahan	136.434.000	136.434.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	120.081.000	120.081.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	33.594.000	33.594.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	22.000.000	22.000.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	59.487.000	59.487.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	5.000.000	5.000.000
Kelurahan Mewek	240.590.000	240.590.000

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	APBD INDUK 2016	PAGU INDIKATIF TAHUN 2016
Program Pengembangan Wilayah	132.897.000	132.897.000
Pengembangan Wilayah Kelurahan	132.897.000	132.897.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	107.693.000	107.693.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	13.280.000	13.280.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	53.252.000	53.252.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	33.161.000	33.161.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	8.000.000	8.000.000
Kelurahan Penambongan	235.449.000	333.449.000
Program Pengembangan Wilayah	145.314.000	145.314.000
Pengembangan Wilayah Kelurahan	145.314.000	145.314.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	90.135.000	188.135.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	26.556.000	26.556.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	26.375.000	124.375.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	31.904.000	31.904.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	5.300.000	5.300.000
Kelurahan Purbalingga Kidul	237.997.000	237.997.000
Program Pengembangan Wilayah	146.194.000	146.194.000
Pengembangan Wilayah Kelurahan	146.194.000	146.194.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	91.803.000	91.803.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	31.459.000	31.459.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	29.530.000	29.530.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	25.814.000	25.814.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	5.000.000	5.000.000
Kelurahan Purbalingga Kulon	228.931.000	228.931.000
Program Pengembangan Wilayah	137.274.000	137.274.000
Pengembangan Wilayah Kelurahan	137.274.000	137.274.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	91.657.000	91.657.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	14.554.000	14.554.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	25.872.000	25.872.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	46.231.000	46.231.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	5.000.000	5.000.000
Kelurahan Purbalingga Lor	238.350.000	238.350.000
Program Pengembangan Wilayah	148.194.000	148.194.000
Pengembangan Wilayah Kelurahan	148.194.000	148.194.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	90.156.000	90.156.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	15.280.000	15.280.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	32.300.000	32.300.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	37.576.000	37.576.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	5.000.000	5.000.000
Kelurahan Purbalingga Wetan	250.194.000	250.194.000
Program Pengembangan Wilayah	147.674.000	147.674.000
Pengembangan Wilayah Kelurahan	147.674.000	147.674.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	102.520.000	102.520.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	22.090.000	22.090.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	21.350.000	21.350.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	54.080.000	54.080.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	5.000.000	5.000.000
Kelurahan Wirasana	253.291.000	253.291.000
Program Pengembangan Wilayah	141.954.000	141.954.000
Pengembangan Wilayah Kelurahan	141.954.000	141.954.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	111.337.000	111.337.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	35.420.000	35.420.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	23.250.000	23.250.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	47.667.000	47.667.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	5.000.000	5.000.000
Sekretariat Daerah	27.734.038.000	34.890.697.800
Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.708.532.000	4.564.785.000
Fasilitasi Pelayanan Kegiatan Wakil Kepala Daerah	910.289.000	1.087.799.000
Fasilitasi Pelayanan Kegiatan Kepala Daerah	1.376.993.000	1.422.323.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepala Daerah	622.350.000	565.800.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Wakil Kepala Daerah	598.900.000	692.353.000
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Kepala Daerah	100.000.000	597.500.000
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Wakil Kepala Daerah	100.000.000	199.010.000
Program Pemberdayaan Sosial dan Keagamaan	69.350.000	69.350.000
Pengendalian Bidang Kesejahteraan	69.350.000	69.350.000
Program Penataan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah di	2.027.957.000	2.539.004.500
Evaluasi Kelembagaan	150.000.000	150.000.000
Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa	569.800.000	869.800.000
Inventarisasi dan Verifikasi Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D)		30.069.500
Laboratorium Inovasi Administrasi Negara		50.000.000

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	APBD INDUK 2016	PAGU INDIKATIF TAHUN 2016
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	42.000.000	42.000.000
Pembinaan Jasa Konstruksi	35.200.000	45.000.000
Pengadaan Foto dan Pigura Bupati dan Wakil Bupati		167.050.000
Pengembangan Budaya Kerja	30.000.000	50.000.000
Pengendalian dan Koordinasi Bidang Organisasi dan Kepegawaian	40.000.000	40.000.000
Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	55.000.000	55.000.000
Peningkatan Koordinasi Pimpinan Daerah	548.300.000	327.190.000
Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah (FC)	25.000.000	25.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemerintah Tingkat Kabupaten	42.657.000	190.135.000
Penyusunan LK J ip 2015 dan Perjanjian Kinerja 2016 Kabupaten Purbalingga	100.000.000	117.760.000
Penyusunan Naskah Akademik Raperda	75.000.000	65.000.000
Penyusunan Simbangda Kabupaten Purbalingga	125.000.000	125.000.000
Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH)	55.000.000	55.000.000
Validasi Hasil Evaluasi Jabatan Struktural PNS Pemkab Purbalingga	135.000.000	135.000.000
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa	617.665.000	719.420.000
Diklat Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa	240.206.000	240.206.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	55.490.000	55.490.000
Pemilihan Kepala Desa	321.969.000	328.724.000
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa		95.000.000
Program Penguatan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	214.246.000	214.246.000
Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Produk Hukum Pemerintahan Desa	39.400.000	39.400.000
Penyusunan Himpunan Produk Hukum Daerah tentang Pemerintahan Desa	20.210.000	20.210.000
Program Legislasi Daerah	154.636.000	154.636.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	19.126.987.000	24.252.005.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.593.650.000	2.147.800.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	100.000.000	100.000.000
Pengadaan Buku Saku ASN		81.050.000
Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	60.000.000	60.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas	1.200.000.000	1.630.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	226.200.000	243.200.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.701.710.000	1.087.005.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	13.261.572.000	17.323.515.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD		10.250.000
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) 2015, Perjanjian Kinerja	30.000.000	117.760.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	953.855.000	1.401.425.000
Penyusunan DED Penataan Komplek Rumah Dinas Wakil Bupati		50.000.000
Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Da	922.500.000	1.186.307.000
Bintek Sertifikasi Barang dan Jasa	150.000.000	180.000.000
Fasilitasi Kegiatan Dekranasda dan Promosi Potensi Daerah	130.000.000	305.350.000
Fasilitasi Program Subsidi Bunga	35.000.000	69.310.000
Fasilitasi Tim Koordinasi Konversi LPG 3 Kg	25.000.000	25.000.000
Fasilitasi Tim Koordinasi Penyaluran KUR	25.000.000	25.000.000
Fasilitasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)	30.000.000	30.000.000
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	110.000.000	110.000.000
Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	60.000.000	60.000.000
Pengawasan Pupuk dan Pestisida	40.000.000	64.147.000
Pengendalian dan Koordinasi Bidang Perekonomian	50.000.000	50.000.000
Pengumpulan Informasi dan Koordinasi Penggunaan DBHCHT (DBH CHT)	172.500.000	172.500.000
Peningkatan Kapasitas BUMD	60.000.000	60.000.000
Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) Kabupaten	35.000.000	35.000.000
Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan Daerah	402.801.000	428.580.300
Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	30.209.000	30.209.000
Pengendalian dan Koordinasi Bidang Tata Pemerintahan	59.971.000	109.975.000
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati.	195.844.000	185.996.300
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi Laporan	116.777.000	102.400.000
Program Penyusunan Produk Hukum dan Pembinaan Pelayanan Hukum	644.000.000	917.000.000
Bantuan dan Konsultasi Hukum	120.000.000	200.000.000
Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	20.000.000	20.000.000
Pembekalan Teknis Penyelesaian Sengketa Hukum di Masyarakat	20.000.000	20.000.000
Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	10.000.000
Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah	15.000.000	15.000.000
Pengawasan Represif Produk hukum Pemerintahan Desa	18.000.000	18.000.000
Pengendalian dan Koordinasi Bidang Hukum dan HAM	43.000.000	43.000.000
Penyediaan, Penyempurnaan dan Pengelolaan SIDI Hukum	25.000.000	48.400.000
Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat, Lomba Kadarkum dan Desa Sadar Hukum	78.000.000	156.000.000
Penyusunan Himpunan Perda, Abstrak Perda, Himpunan Peraturan Bupati, dan Ke	80.000.000	80.000.000
Penyusunan Konsep dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah	215.000.000	256.600.000
Sosialisasi Undang-undang Tipikor		50.000.000
Sekretariat DPRD	16.957.070.000	22.660.051.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	3.799.387.000	4.048.083.000

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	APBD INDUK 2016	PAGU INDIKATIF TAHUN 2016
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.054.669.000	1.089.999.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	52.000.000	52.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	154.125.000	155.625.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	835.400.000	907.270.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	1.387.503.000	1.448.833.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	10.000.000	10.156.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	305.690.000	384.200.000
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	13.157.683.000	18.611.968.000
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.479.568.000	5.526.127.000
Pembuatan Majalah Komunikatif DPRD	316.192.000	317.852.000
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	7.080.082.000	9.226.972.000
Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD	662.074.000	722.632.000
Reses	2.560.229.000	2.751.479.000
Sosialisasi dan Dokumentasi Produk Hukum DPRD	59.538.000	66.906.000
Industri	1.814.000.000	1.934.000.000
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	1.814.000.000	1.934.000.000
Program Pengembangan Sentra Industri Potensial	684.000.000	804.000.000
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan UPTD Logam dan LK Logam	300.000.000	420.000.000
Fasilitasi Peningkatan Sarana Produksi Industri Kecil Potensial dan Kerajinan	80.000.000	80.000.000
Fasilitasi Peningkatan Sarana Tempat Usaha Industri Kecil	89.000.000	89.000.000
Instalasi Ulang Listrik UPTD Logam Purbalingga	65.000.000	65.000.000
Penyusunan FS, DED, dan RKL Pengembangan Sentra Logam dan Komponen Otom	150.000.000	150.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Iptek dalam Sistem Produksi Industri Kecil dan Meneng	1.130.000.000	1.130.000.000
Fasilitasi Peningkatan Kualitas dan Diversifikasi Produk IKM Kerajinan Bambu	130.000.000	130.000.000
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Produk Batu Akik Klwing (DBH-CHT)	300.000.000	300.000.000
Pelatihan dan Bantuan Peralatan IKM Sapu (DBH-CHT)	100.000.000	100.000.000
Pengembangan Kualitas Gula Kelapa Organik (DBH-CHT)	600.000.000	600.000.000
Kearsipan	690.450.000	690.450.000
Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	15.000.000	15.000.000
Program Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Administrasi Kearsipan	15.000.000	15.000.000
Akuisisi Arsip	15.000.000	15.000.000
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	675.450.000	675.450.000
Program Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Administrasi Kearsipan	675.450.000	675.450.000
Pembinaan Kearsipan SKPD	50.000.000	50.000.000
Pendokumentasian Momentum Penting Pemerintah Kabupaten Purbalingga	75.450.000	75.450.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan	350.000.000	350.000.000
Pengolahan Arsip di Depo Arsip	150.000.000	150.000.000
Penyusunan Pedoman Kearsipan	10.000.000	10.000.000
Sosialisasi Kearsipan	20.000.000	20.000.000
Workshop Kearsipan	20.000.000	20.000.000
Kebudayaan	2.386.954.000	5.580.164.000
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	2.124.954.000	5.209.914.000
Program Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	2.124.954.000	5.209.914.000
Apresiasi Seni	241.291.000	241.291.000
Fasilitasi Pentas dan Pembinaan Kelompok Seni	114.165.000	892.625.000
Festival Gunung Slamet	500.000.000	500.000.000
Festival Seni dan Budaya	83.576.000	88.726.000
Gelar Seni dan Budaya	250.000.000	724.300.000
Kemah Budaya	21.067.000	21.067.000
Konservasi Situs dan Cagar Budaya	25.000.000	25.000.000
Pekan Budaya dan Pariwisata dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Purbalingga	391.186.000	896.986.000
Pelestarian Cagar Budaya	75.827.000	75.827.000
Pembangunan Monumen/Tugu Bersejarah	15.000.000	15.000.000
Pengelolaan Museum, Monumen, dan Panggung Kesenian	43.720.000	43.720.000
Pengiriman Peserta Lomba Karya Tulis Sejarah, Kepurbakalaan dan Napak Tilas/ L	9.755.000	15.160.000
Pengiriman Tim Kesenian Tingkat Provinsi dan Nasional	197.550.000	203.395.000
Pengiriman Tim Parade Seni Hari Ulang Tahun Jawa Tengah	48.655.000	48.655.000
Penyusunan Raperda Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya		25.000.000
Revitalisasi dan Dokumentasi Kesenian Tradisional Purbalingga	83.576.000	83.576.000
Revitalisasi Museum Prof. Dr. Soegarda Poerbakawatja		60.000.000
Safari Cagar Budaya dan Kesejarahan	10.055.000	10.055.000
Temu Pelaku Budaya	14.531.000	14.531.000
Purbalingga Expo		1.000.000.000
Penataan Makam Adipati Onje		225.000.000
Sekretariat Daerah	262.000.000	370.250.000
Program Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	262.000.000	370.250.000
Pentas Apresiasi Seni	262.000.000	370.250.000
Kelautan dan Perikanan	1.225.663.000	1.257.463.000
Dinas Peternakan dan Perikanan	1.225.663.000	1.257.463.000
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	555.630.000	587.430.000

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	APBD INDUK 2016	PAGU INDIKATIF TAHUN 2016
Fasilitasi PUMP Perikanan Budidaya	10.000.000	10.000.000
Pelatihan dan Magang Pelaku Usaha Perikanan (DBH-CHT)	45.000.000	60.000.000
Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan	433.462.000	433.462.000
Pembinaan dan Pengembangan Teknis dan Manajemen Usaha Perikanan	10.000.000	10.000.000
Pengelolaan UPTD-BIAT	57.168.000	73.968.000
Program Pengembangan dan Pelestarian Sumberdaya Perikanan Perairan Umum	30.000.000	30.000.000
Pengendalian dan Pemeliharaan SHP Perairan Umum	30.000.000	30.000.000
Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	640.033.000	640.033.000
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Usaha Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Per	10.000.000	10.000.000
Pelatihan dan Magang Pengolahan Hasil Perikanan	65.000.000	65.000.000
Peningkatan Mutu dan Pemasaran hasil Perikanan (DAK)	465.033.000	465.033.000
Promosi dan Gerakan Gemar Makan Ikan	100.000.000	100.000.000
Kepemudaan dan Olahraga	105.275.000	216.020.000
Sekretariat Daerah	105.275.000	216.020.000
Program Pemberdayaan Sosial dan Keagamaan	105.275.000	216.020.000
Pembinaan Olahraga Jumat Pagi, Minggu Pagi dan Olahraga Lainnya	105.275.000	216.020.000
Kesehatan	186.328.294.000	253.325.342.303
Dinas Kesehatan	46.482.218.000	56.756.525.000
Program Kesehatan Matra	61.285.000	61.285.000
Fasilitasi PPPK	28.585.000	28.585.000
Kesiapsiagaan Bencana	15.000.000	15.000.000
Pelayanan Kesehatan Haji	17.700.000	17.700.000
Program Pelayanan KIA, Remaja, dan Usia Lanjut	152.304.000	270.492.000
Fasilitasi upaya Pencegahan Kematian Ibu dan Bayi	126.144.000	244.332.000
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja	12.000.000	12.000.000
Peningkatan Pelayanan Lansia dan KB	14.160.000	14.160.000
Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	643.000.000	1.575.698.000
Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	-	579.698.000
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	-	264.000.000
Bintek Petugas Pengelola Obat dan Petugas Laboratorium	16.230.000	16.230.000
Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	-	89.000.000
Manajemen Kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan	215.000.000	215.000.000
Pelayanan Kesehatan Jiwa	7.300.000	7.300.000
Pelayanan Perijinan Registrasi Kesehatan	19.060.000	19.060.000
Pembinaan Akreditasi UPTD Puskesmas	361.730.000	361.730.000
Penilaian Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan	10.000.000	10.000.000
Supervisi Terpadu	13.680.000	13.680.000
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	699.782.000	754.066.000
BIAS Campak dan DT/TT	25.000.000	25.000.000
Eliminasi Malaria	152.212.000	160.012.000
Imunisasi Rutin	50.000.000	50.000.000
Pembentukan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (POSBINDU PTM)	15.000.000	34.500.000
Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang	250.483.000	277.467.000
Pemberantasan Penyakit Menular Langsung	16.650.000	16.650.000
Penanganan Kasus TB Multi Drugs Resisten	144.400.000	144.400.000
Penanggulangan HIV / AIDS	17.000.000	17.000.000
Pencegahan dan Pemberantasan Filaria dan Kecacingan	10.967.000	10.967.000
Surveilans Epidemiologi	18.070.000	18.070.000
Program Pengelolaan Obat Publik, Makanan, Minuman dan Perbekalan Farmasi	3.618.715.000	3.642.715.000
Pemeriksaan Makanan dan Minuman	24.000.000	24.000.000
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK)	3.520.988.000	3.520.988.000
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar (luncuran DAK)	-	24.000.000
Pengadaan Reagen Refill Complete Food Test Kit	61.097.000	61.097.000
Pengawasan Peredaran Obat dan Kosmetika	12.630.000	12.630.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	1.287.041.000	1.416.841.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	396.157.000	406.157.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	15.000.000	25.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	269.300.000	313.100.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	353.954.000	389.954.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	10.000.000	10.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	242.630.000	272.630.000
Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan	34.679.237.000	42.163.250.000
Pembangunan / Rehabilitasi Sarana / Prasarana Pelayanan Kesehatan (DAK)	7.100.861.000	7.100.861.000
Pembangunan Puskesmas Rembang	5.000.000.000	-
Pembangunan RSKBD Panti Nugroho	15.649.500.000	15.649.500.000
Penataan /Pembangunan Prasarana Lingkungan RSIA Panti Nugroho	-	-
Pengadaan Alat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas Rawat Jalan, Ra	-	9.537.079.000
Pengadaan Alat Kesehatan dan Peralatan Puskesmas Kabupaten Purbalingga (Ban	-	2.216.854.000
Pengadaan Peralatan Kesehatan (Luncuran)	627.236.000	627.236.000
Pengadaan Sarana Pelayanan Kesehatan	1.250.000.000	1.250.000.000

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	APBD INDUK 2016	PAGU INDIKATIF TAHUN 2016
Pengadaan Tanah Pengembangan Puskesmas	5.051.640.000	5.051.640.000
Penyusunan DED Puskesmas Karangreja, Karangjambu, Kejobong, Kutasari, dan Karangtengah		480.080.000
Rehabilitasi Terminal Kutasari untuk Puskesmas Kutasari		250.000.000
Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan	3.114.440.000	3.114.440.000
Fasilitasi PAMSI-PAS Komponen B	10.000.000	10.000.000
Fasilitasi peningkatan Klinik Sanitasi di Puskesmas	87.000.000	87.000.000
Jambanisasi	3.000.000.000	3.000.000.000
Pengawasan Kualitas Sumber Air Bersih dan Sanitasi di TTU/TPM	4.940.000	4.940.000
Pengendalian Vektor Lalat di TPA dan TPS	12.500.000	12.500.000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	177.220.000	177.220.000
Pembinaan Kadarzi dan Survei PSG	28.554.000	28.554.000
Pencegahan Penanggulangan Masalah KEP, AGB, KVA dan Kekurangan Zat Gizi Mik	66.170.000	66.170.000
Perawatan Balita Gizi Buruk di Pusat Pemulihan Gizi (PPG)	27.000.000	27.000.000
Usaha Perbaikan Gizi Institusi SD/MI	55.496.000	55.496.000
Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.049.194.000	3.580.518.000
Advokasi dan Sosialisasi Implementasi SJSN	63.490.000	63.490.000
Fasilitasi Desa Sehat Mandiri (DSM)	283.200.000	336.850.000
Monitoring dan Evaluasi Program Jamkesda	168.979.000	168.979.000
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	1.191.416.000	2.698.970.000
Pembinaan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat	30.727.000	30.727.000
Pembinaan Usaha Kesehatan Kerja	9.000.000	9.000.000
Pengelolaan Jamkesda	200.206.000	170.326.000
Penyelenggaraan Sekolah Sehat	36.560.000	36.560.000
Promosi Kesehatan Melalui Berbagai Media	65.616.000	65.616.000
RSKBD Pantli Nugroho	10.007.352.000	13.998.328.946
Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	7.191.345.000	11.182.321.946
Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	7.191.345.000	11.182.321.946
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	2.816.007.000	2.816.007.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	131.117.000	131.117.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	40.000.000	40.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.070.170.000	2.070.170.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	550.180.000	550.180.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	24.540.000	24.540.000
RSUD Goeteng Taroenadibrata	80.419.966.000	109.385.350.052
Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	-	396.400.000
Akreditasi Rumah Sakit (DAK Non Fisik)	-	396.400.000
Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	6.681.519.000	13.836.907.000
Pembangunan Instalasi Pengolah Limbah (IPAL) (luncuran DAK)	2.298.735.000	2.298.735.000
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Peralatan Ruang Operasi (DAK)	4.382.784.000	4.382.784.000
Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata Kab. Purbalima	-	7.155.388.000
Program Peningkatan Pelayanan pada BLUD	71.738.447.000	93.152.043.052
Kegiatan Pelayanan	62.698.447.000	84.112.043.052
Kegiatan Pendukung Pelayanan	9.040.000.000	9.040.000.000
Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.000.000.000	2.000.000.000
Subsidi Pembelian Obat-Obatan RSUD Sebagai Pengganti Pelayanan Kesehatan Ke	2.000.000.000	2.000.000.000
UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten	800.000.000	1.004.653.000
Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	520.631.000	725.284.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	520.631.000	725.284.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	279.369.000	279.369.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	140.630.000	140.630.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	91.600.000	91.600.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	46.339.000	46.339.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	800.000	800.000
UPTD Puskesmas Bobotsari	3.258.729.000	4.582.930.859
Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	517.314.000	1.252.307.000
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	-	267.000.000
Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	-	316.000.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	517.314.000	669.307.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	484.166.000	484.166.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	105.061.000	105.061.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	206.975.000	206.975.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	163.130.000	163.130.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	9.000.000	9.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	2.184.648.000	2.773.856.859
Fasilitasi Kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif	84.483.000	84.483.000
Upaya Pelayanan Kesehatan	2.100.165.000	2.689.373.859
Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	72.601.000	72.601.000
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	72.601.000	72.601.000
UPTD Puskesmas Bojong	685.400.000	1.192.085.749
Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	74.473.000	386.782.000

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	APBD INDUK 2016	PAGU INDIKATIF TAHUN 2016
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	-	185.000.000
Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	-	105.000.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	74.473.000	96.782.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	58.977.000	58.977.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	14.011.000	14.011.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	7.300.000	7.300.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	32.566.000	32.566.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	5.100.000	5.100.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	540.000.000	734.376.749
Fasilitasi Kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif	3.590.000	3.590.000
Upaya Pelayanan Kesehatan	536.410.000	730.786.749
Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	11.950.000	11.950.000
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	11.950.000	11.950.000
UPTD Puskesmas Bojongsari	2.853.828.000	3.870.535.567
Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	300.650.000	803.952.000
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	-	257.600.000
Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	-	220.000.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	300.650.000	326.352.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	202.150.000	202.150.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	42.770.000	42.770.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	57.900.000	57.900.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	84.580.000	84.580.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	16.900.000	16.900.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	2.316.000.000	2.829.405.567
Fasilitasi Kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif	142.845.000	142.845.000
Upaya Pelayanan Kesehatan	2.173.155.000	2.686.560.567
Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	35.028.000	35.028.000
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	35.028.000	35.028.000
UPTD Puskesmas Bukateja	2.385.555.000	3.673.875.353
Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	314.755.000	708.598.000
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	-	239.600.000
Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	-	152.000.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	314.755.000	316.998.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	178.045.000	178.045.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	62.974.000	62.974.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	26.400.000	26.400.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	69.046.000	69.046.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	19.625.000	19.625.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1.836.000.000	2.730.477.353
Fasilitasi Kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif	14.030.000	14.030.000
Upaya Pelayanan Kesehatan	1.821.970.000	2.716.447.353
Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	56.755.000	56.755.000
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	56.755.000	56.755.000
UPTD Puskesmas Kaligondang	1.662.155.000	2.531.483.646
Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	89.639.000	387.020.000
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	-	190.000.000
Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	-	123.000.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	89.639.000	74.020.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	108.111.000	108.111.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	19.634.000	19.634.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	43.550.000	43.550.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	44.927.000	44.927.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1.398.903.000	1.970.850.646
Fasilitasi Kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif	62.934.000	62.934.000
Upaya Pelayanan Kesehatan	1.335.969.000	1.907.916.646
Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	65.502.000	65.502.000
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	65.502.000	65.502.000
UPTD Puskesmas Kalikajar	930.328.000	1.658.429.463
Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	78.755.000	354.604.000
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	-	185.000.000
Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	-	98.039.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	78.755.000	71.565.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	57.155.000	57.155.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	21.650.000	21.650.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	32.805.000	32.805.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.700.000	2.700.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	780.000.000	1.232.252.463
Fasilitasi Kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif	16.380.000	16.380.000
Upaya Pelayanan Kesehatan	763.620.000	1.215.872.463
Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	14.418.000	14.418.000

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	APBD INDUK 2016	PAGU INDIKATIF TAHUN 2016
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	14.418.000	14.418.000
UPTD Puskesmas Kalimanah	2.389.556.000	3.336.366.742
Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	192.269.000	672.949.000
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	-	257.000.000
Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	-	218.000.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	192.269.000	197.949.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	185.426.000	185.426.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	29.120.000	29.120.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	76.415.000	76.415.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	72.981.000	72.981.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	6.910.000	6.910.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1.909.986.000	2.376.116.742
Fasilitasi Kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif	78.221.000	78.221.000
Upaya Pelayanan Kesehatan	1.831.765.000	2.297.895.742
Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	101.875.000	101.875.000
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	101.875.000	101.875.000
UPTD Puskesmas Karanganyar	2.474.679.000	3.299.083.544
Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	463.468.000	1.186.502.000
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	-	263.000.000
Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	-	315.000.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	463.468.000	608.502.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	182.256.000	182.256.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	61.177.000	61.177.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	29.050.000	29.050.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	83.439.000	83.439.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	8.590.000	8.590.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1.764.000.000	1.865.370.544
Fasilitasi Kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif	2.250.000	2.250.000
Upaya Pelayanan Kesehatan	1.761.750.000	1.863.120.544
Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	64.955.000	64.955.000
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	64.955.000	64.955.000
UPTD Puskesmas Karangjambu	1.276.474.000	2.322.445.302
Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	144.681.000	788.268.100
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	-	185.000.000
Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	-	316.000.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	144.681.000	287.268.100
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	112.900.000	112.900.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	27.914.000	27.914.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	37.900.000	37.900.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	36.086.000	36.086.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	11.000.000	11.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	984.000.000	1.386.384.202
Fasilitasi Kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif	1.430.000	1.430.000
Upaya Pelayanan Kesehatan	982.570.000	1.384.954.202
Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	34.893.000	34.893.000
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	34.893.000	34.893.000
UPTD Puskesmas Karangmoncol	2.841.525.000	4.006.794.448
Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	458.210.000	1.154.520.000
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	-	260.000.000
Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	-	320.000.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	458.210.000	574.520.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	286.690.000	286.690.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	80.960.000	80.960.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	88.965.000	88.965.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	91.685.000	91.685.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	25.080.000	25.080.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1.980.000.000	2.448.959.448
Fasilitasi Kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif	100.850.000	100.850.000
Upaya Pelayanan Kesehatan	1.879.150.000	2.348.109.448
Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	116.625.000	116.625.000
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	116.625.000	116.625.000
UPTD Puskesmas Karangreja	3.121.827.000	4.746.371.541
Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	400.966.000	952.194.000
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	-	195.000.000
Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	-	307.000.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	400.966.000	450.194.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	235.078.000	235.078.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	72.951.000	72.951.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	68.500.000	68.500.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	68.957.000	68.957.000

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	APBD INDUK 2016	PAGU INDIKATIF TAHUN 2016
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	24.670.000	24.670.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	2.400.000.000	3.473.316.541
Fasilitasi Kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif	251.917.000	251.917.000
Upaya Pelayanan Kesehatan	2.148.083.000	3.221.399.541
Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	85.783.000	85.783.000
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	85.783.000	85.783.000
UPTD Puskesmas Karangtengah	1.987.274.000	2.955.903.002
Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	168.385.000	825.276.000
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	-	231.500.000
Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	-	316.000.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	168.385.000	277.776.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	115.585.000	115.585.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	37.270.000	37.270.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	20.750.000	20.750.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	47.055.000	47.055.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	10.510.000	10.510.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1.664.640.000	1.976.378.002
Fasilitasi Kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif	53.625.000	53.625.000
Upaya Pelayanan Kesehatan	1.611.015.000	1.922.753.002
Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	38.664.000	38.664.000
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	38.664.000	38.664.000
UPTD Puskesmas Kejobong	2.773.434.000	3.877.331.116
Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	387.450.000	718.742.000
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	-	190.000.000
Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	-	127.100.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	387.450.000	401.642.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	188.584.000	188.584.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	55.721.000	55.721.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	32.350.000	32.350.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	75.263.000	75.263.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	25.250.000	25.250.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	2.099.112.000	2.871.717.116
Fasilitasi Kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif	14.720.000	14.720.000
Upaya Pelayanan Kesehatan	2.084.392.000	2.856.997.116
Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	98.288.000	98.288.000
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	98.288.000	98.288.000
UPTD Puskesmas Kemangkong	2.516.080.000	4.981.843.017
Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	51.029.000	519.815.000
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	-	263.000.000
Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	-	170.000.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	51.029.000	86.815.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	110.791.000	110.791.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	31.133.000	31.133.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	34.400.000	34.400.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	45.258.000	45.258.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	2.269.260.000	4.266.237.017
Fasilitasi Kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif	85.099.000	85.099.000
Upaya Pelayanan Kesehatan	2.184.161.000	4.181.138.017
Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	85.000.000	85.000.000
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	85.000.000	85.000.000
UPTD Puskesmas Kutasari	3.289.288.000	4.392.823.760
Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	132.865.000	697.765.000
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	-	245.900.000
Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	-	319.000.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	132.865.000	132.865.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	106.125.000	106.125.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	21.981.000	21.981.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	18.300.000	18.300.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	45.844.000	45.844.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	20.000.000	20.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	3.019.824.000	3.558.459.760
Fasilitasi Kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif	292.566.000	292.566.000
Upaya Pelayanan Kesehatan	2.727.258.000	3.265.893.760
Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	30.474.000	30.474.000
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	30.474.000	30.474.000
UPTD Puskesmas Kutawis	1.636.210.000	2.590.846.830
Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	123.201.000	529.421.500
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	-	190.000.000
Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	-	117.000.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	123.201.000	222.421.500

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	APBD INDUK 2016	PAGU INDIKATIF TAHUN 2016
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	75.430.000	75.430.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	28.192.000	28.192.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	5.400.000	5.400.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	38.638.000	38.638.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	3.200.000	3.200.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1.371.546.000	1.919.962.330
Upaya Pelayanan Kesehatan	1.371.546.000	1.919.962.330
Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	66.033.000	66.033.000
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	66.033.000	66.033.000
UPTD Puskesmas Mrebet	1.671.843.000	2.643.457.892
Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	117.680.000	640.795.000
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	-	243.000.000
Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	-	276.000.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	117.680.000	121.795.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	92.671.000	92.671.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	21.715.000	21.715.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	4.025.000	4.025.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	57.931.000	57.931.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	9.000.000	9.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1.440.000.000	1.888.499.892
Fasilitasi Kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif	25.435.000	25.435.000
Upaya Pelayanan Kesehatan	1.414.565.000	1.863.064.892
Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	21.492.000	21.492.000
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	21.492.000	21.492.000
UPTD Puskesmas Padamara	2.055.133.000	3.015.593.355
Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	240.630.000	908.538.400
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	-	255.500.000
Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	-	200.000.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	240.630.000	453.038.400
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	184.370.000	184.370.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	40.110.000	40.110.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	56.475.000	56.475.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	78.385.000	78.385.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	9.400.000	9.400.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1.596.000.000	1.888.551.955
Fasilitasi Kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif	23.935.000	23.935.000
Upaya Pelayanan Kesehatan	1.572.065.000	1.864.616.955
Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	34.133.000	34.133.000
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	34.133.000	34.133.000
UPTD Puskesmas Pengadegan	1.937.285.000	2.992.896.120
Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	121.987.000	539.453.000
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	-	255.900.000
Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	-	93.000.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	121.987.000	190.553.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	93.886.000	93.886.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	30.965.000	30.965.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	12.250.000	12.250.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	44.236.000	44.236.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	6.435.000	6.435.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1.676.304.000	2.314.449.120
Fasilitasi Kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif	33.400.000	33.400.000
Upaya Pelayanan Kesehatan	1.642.904.000	2.281.049.120
Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	45.108.000	45.108.000
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	45.108.000	45.108.000
UPTD Puskesmas Purbalingga	1.508.383.000	2.233.129.463
Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	155.034.000	563.596.000
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	-	255.000.000
Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	-	75.000.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	155.034.000	233.596.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	150.058.000	150.058.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	34.800.000	34.800.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	24.810.000	24.810.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	81.528.000	81.528.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	8.920.000	8.920.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1.164.798.000	1.480.982.463
Fasilitasi Kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif	74.240.000	74.240.000
Upaya Pelayanan Kesehatan	1.090.558.000	1.406.742.463
Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	38.493.000	38.493.000
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	38.493.000	38.493.000
UPTD Puskesmas Rembang	3.060.741.000	4.278.545.408

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	APBD INDUK 2016	PAGU INDIKATIF TAHUN 2016
Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	301.832.000	881.640.000
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	-	205.000.000
Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	-	340.000.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	301.832.000	336.640.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	245.152.000	245.152.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	86.220.000	86.220.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	38.540.000	38.540.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	92.902.000	92.902.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	27.490.000	27.490.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	2.359.320.000	2.997.316.408
Fasilitasi Kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif	218.710.000	218.710.000
Upaya Pelayanan Kesehatan	2.140.610.000	2.778.606.408
Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	154.437.000	154.437.000
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	154.437.000	154.437.000
UPTD Puskesmas Serayu Larangan	2.303.031.000	2.997.713.128
Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	592.660.000	1.094.660.000
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	-	197.000.000
Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	-	305.000.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	592.660.000	592.660.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	272.340.000	272.340.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	79.931.000	79.931.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	70.455.000	70.455.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	79.579.000	79.579.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	42.375.000	42.375.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1.356.000.000	1.548.682.128
Fasilitasi Kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif	30.915.000	30.915.000
Upaya Pelayanan Kesehatan	1.325.085.000	1.517.767.128
Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	82.031.000	82.031.000
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	82.031.000	82.031.000
Ketahanan Pangan	687.200.000	746.075.000
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	687.200.000	746.075.000
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	687.200.000	746.075.000
Fasilitasi Cadangan dan Distribusi Pangan	38.000.000	38.000.000
Fasilitasi Desa Mandiri Pangan	30.000.000	30.000.000
Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan	33.000.000	33.000.000
Fasilitasi Pemanfaatan Pekarangan	30.000.000	30.000.000
Fasilitasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	141.000.000	141.000.000
Fasilitasi Raskin	185.000.000	185.000.000
Operasional Gudang Cadangan Pangan Kabupaten	15.000.000	15.000.000
Pelatihan Usaha Pengolahan Bahan Pangan Potensi Lokal (DBH-CHT)	65.000.000	65.000.000
Pembinaan Kewaspadaan dan Keamanan Pangan	20.000.000	32.485.000
Pengadaan Sarana Prasarana Lumbung Desa (DAK)	130.200.000	176.590.000
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.962.387.000	12.936.931.500
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.534.806.000	4.637.654.500
Program Fasilitasi dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik	220.575.000	537.616.500
Fasilitasi Kegiatan Organisasi Politik dan Penyusunan Data serta Peta Partai Politik	10.351.000	10.351.000
Fasilitasi Kegiatan Ormas, LSM, dan Pemantauan Aspirasi Masyarakat	42.996.000	197.758.500
Fasilitasi Program Kerjasama Pemda dengan Ormas, LSM, dan Lembaga Nirlaba La	54.534.000	54.534.000
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	31.525.000	31.525.000
Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)	69.227.000	231.506.000
Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Fasilitasi Kegiatan Parta	11.942.000	11.942.000
Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan	138.910.000	1.698.058.000
Fasilitasi Tim Terpadu Gangguan Konflik Sosial	24.613.000	87.858.000
Pendidikan Kader Bela Negara		1.469.263.000
Pendidikan Wawasan Kebangsaan	101.097.000	101.097.000
Sarasehan Pembauran Etnis	13.200.000	39.840.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	1.178.584.000	1.355.363.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	196.030.000	211.057.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	8.000.000	8.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	666.670.000	758.670.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	176.614.000	190.601.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	19.880.000	25.820.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	111.390.000	161.215.000
Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	996.737.000	1.046.617.000
Desk Pilkades	151.071.000	151.071.000
Fasilitasi Jaringan Komunikasi Masyarakat	10.000.000	10.000.000
Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap	20.000.000	20.000.000
Keamanan Terpadu	352.800.000	390.800.000
Pemberdayaan Badan Koordinasi dan Informasi	391.266.000	403.146.000
Pengamanan Tertutup Lebaran, Natal, Tahun Baru dan Tamu VVIP	71.600.000	71.600.000

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	APBD INDUK 2016	PAGU INDIKATIF TAHUN 2016
Satuan Polisi Pamong Praja	2.796.081.000	3.336.121.000
Program Pembinaan dan Penegakan Peraturan Daerah	147.186.000	343.853.000
Operasional Pengawasan		60.400.000
Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan Pembekalan Tugas bagi Anggota Penyidik	43.236.000	43.236.000
Penertiban Pelanggaran Hukum terhadap Ketentuan Pidana Perda dan Peraturan	27.600.000	73.206.000
Pengawasan dan Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal (DBHCHT)	24.200.000	24.200.000
Penyusunan Raperda Ketertiban Umum		36.932.000
Razia PGOT		24.700.000
Razia Reklame	52.150.000	81.179.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	1.348.293.000	1.725.589.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	477.646.000	489.576.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	75.000.000	172.500.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	132.175.000	178.165.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	283.500.000	390.720.000
Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja		50.000.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	195.527.000	220.428.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	7.000.000	8.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	177.445.000	216.200.000
Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	1.150.602.000	1.116.679.000
Operasional Petugas Teknik Operasi Pol PP	561.800.000	421.770.000
Patroli Terpadu	30.710.000	30.710.000
Pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat Inti (Satlinmas Inti)	66.280.000	66.280.000
Pemantauan Daerah Rawan Bencana dan Kejadian Bencana	18.200.000	22.270.000
Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)	33.270.000	67.809.000
Pengamanan Lebaran, Natal, Tahun Baru, dan Tamu VIP	134.924.000	184.294.000
Pengamanan Pilkadaes	288.718.000	303.020.000
Razia Anak Sekolah	16.700.000	20.526.000
Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	150.000.000	150.000.000
Pembangunan Repeater Telekomunikasi	150.000.000	150.000.000
Sekretariat Daerah	3.631.500.000	4.963.156.000
Program Pemberdayaan Sosial dan Keagamaan	3.631.500.000	4.963.156.000
Fasilitasi Ibadah Haji	321.300.000	521.950.000
Pembinaan Guru Madin dan Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N)	1.680.200.000	1.680.200.000
Religius Keagamaan	1.390.000.000	2.521.006.000
Tarweh Keliling dan Buka Puasa Bersama	240.000.000	240.000.000
Komunikasi dan Informatika	1.447.609.000	3.348.632.800
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	714.501.000	2.320.501.000
Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi	682.276.000	752.276.000
Fasilitasi dan Pembinaan Forum/Kelompok Media Tradisional dan Kelompok Infor	45.000.000	45.000.000
Monitoring dan Pendataan Postel	10.000.000	10.000.000
Pembinaan dan Monitoring Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK), MLIK dan	15.000.000	15.000.000
Pemeliharaan Website dan Jaringan Internet	38.700.000	38.700.000
Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat LPSE	125.000.000	125.000.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Teknologi Informasi Terintegrasi	338.576.000	338.576.000
Penyusunan Raperda Pengelolaan, Perizinan dan Retribusi Menara		70.000.000
Teleconference, SMS center dan paper less office	110.000.000	110.000.000
Program Peningkatan Kualitas Informasi Publik	32.225.000	1.568.225.000
Fasilitasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)	22.225.000	22.225.000
Operasional Pendampingan Penyiaran	10.000.000	10.000.000
Relokasi gedung LPPL Purbalingga Radio Suara Perwira (RSP)		1.536.000.000
Sekretariat Daerah	733.108.000	1.028.131.800
Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	733.108.000	1.028.131.800
Dialog Bupati Melalui TV dan Radio	15.000.000	15.000.000
Fasilitasi Penerbitan dan Pengembangan Media Cetak Milik Pemerintah	114.000.000	114.000.000
Konferensi Pers dan Peliputan	40.000.000	60.000.000
Media Tour/ Pers Tour	65.000.000	150.000.000
Pengadaan Alat Dokumentasi dan Shooting	40.000.000	81.000.000
Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Sandi dan Telekomunikasi	54.108.000	60.000.000
Pengendalian dan Koordinasi Bidang Humas	39.000.000	39.000.000
Peningkatan Kualitas Fungsi Bakohumas	26.000.000	32.461.800
Penyusunan Naskah Kebijakan Pemkab	25.000.000	25.000.000
Promosi Potensi Daerah	40.000.000	62.670.000
Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten	200.000.000	239.000.000
Sosialisasi Kebijakan Pemkab Melalui Media Cetak dan Elektronik	75.000.000	150.000.000
Koperasi dan UKM	2.593.242.000	2.763.432.500
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	2.593.242.000	2.763.432.500
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	1.366.827.000	1.384.827.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	387.600.000	395.600.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	20.000.000	20.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	296.695.000	296.695.000

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	APBD INDUK 2016	PAGU INDIKATIF TAHUN 2016
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	502.544.000	512.544.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	9.988.000	9.988.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	150.000.000	150.000.000
Program Penumbuhan dan Pengembangan UMKM	805.000.000	957.190.500
Fasilitasi Hak Merk dan Halal Produk UMKM	15.000.000	15.000.000
Fasilitasi Kemasan bagi UMKM	75.000.000	75.000.000
Fasilitasi Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) Bagi UMKM	35.000.000	35.000.000
Gelar Produk UMKM	100.000.000	190.690.500
Operasional Griya UMKM	20.000.000	25.500.000
Pelaksanaan Kredit Usaha Produktif		56.000.000
Pelatihan Manajemen Usaha Kecil	20.000.000	20.000.000
Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku UMKM (DBH-CHT)	200.000.000	200.000.000
Pemberdayaan SDM Penyuluh Perindag	25.000.000	25.000.000
Penguatan Kelembagaan UMKM	10.000.000	10.000.000
Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DBH CHT)	235.000.000	235.000.000
Temu Usaha Pelaku UMKM	35.000.000	35.000.000
Workshop Kewirausahaan	35.000.000	35.000.000
Program Penumbuhan, Pengembangan, dan Peningkatan Kualitas Manajemen Koperasi	421.415.000	421.415.000
Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Koperasi	32.000.000	32.000.000
Fasilitasi dan Pengawasan Kinerja Koperasi Syariah	20.000.000	20.000.000
Fasilitasi Uji Kompetensi Pengurus Koperasi	50.000.000	50.000.000
Pelatihan Perkoperasian	19.415.000	19.415.000
Pembinaan dan Fasilitasi B.H (UU No.01 Tahun 2013)	70.000.000	70.000.000
Pengembangan Kelembagaan Perkoperasian	60.000.000	60.000.000
Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	60.000.000	60.000.000
Peringatan Hari Koperasi	50.000.000	50.000.000
Revitalisasi Kinerja Koperasi	60.000.000	60.000.000
Lingkungan Hidup	2.717.590.000	5.312.682.950
Badan Lingkungan Hidup	1.959.763.000	3.329.699.950
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	913.675.000	2.182.461.950
Fasilitasi pengawasan dan pembinaan ketaatan kegiatan/usaha thd pengelolaan LH		25.500.000
Inventarisasi Gas Rumah Kaca	50.000.000	50.000.000
Pemantauan Udara dari Sumber Tidak Bergerak Aktivitas Industri	55.000.000	55.000.000
Pendukung Bank Sampah	30.000.000	30.000.000
Pendukung Program Adiwiyata	30.000.000	50.000.000
Pengadaan Alat Pemrosesan Sampah		200.000.000
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	37.000.000	37.000.000
Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat	150.000.000	175.000.000
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (DAK)	486.675.000	486.675.000
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (DAK-Luncuran)		998.286.950
Perbaikan dan Peningkatan Kualitas Sanitasi Lingkungan Permukiman	75.000.000	75.000.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	614.500.000	665.650.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	171.000.000	185.300.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	20.000.000	20.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	91.000.000	96.000.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	161.500.000	193.350.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	30.000.000	30.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	141.000.000	141.000.000
Program Penyediaan dan Penyempurnaan Data dan Informasi Daerah	55.000.000	55.000.000
Penyusunan Buku Status Lingkungan hidup Daerah (SLHD) Kab. Purbalingga Tahun	55.000.000	55.000.000
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	376.588.000	426.588.000
Pelestarian Pohon di Perkotaan	50.000.000	50.000.000
Pembangunan Tembok Keliling Hutan Kota Kandanggampang	150.000.000	150.000.000
Pembinaan Generasi Muda Bidang Lingkungan Hidup (Saka Kalpataru)	75.000.000	75.000.000
Pengelolaan dan Perlindungan Fungsi Lingkungan Hidup (DAK)	101.588.000	101.588.000
Penyusunan Naskah Akademik Perubahan Perda dan Perbub tentang PPLH		50.000.000
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	757.827.000	1.982.983.000
Program Perlindungan dan Konversi Sumber Daya Alam	757.827.000	1.982.983.000
Pembangunan dan Pemeliharaan Hutan Kota	80.000.000	80.000.000
Penyelesaian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) (Luncuran DAK)	-	1.225.156.000
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) (DAK)	677.827.000	677.827.000
Pariwisata	2.495.935.000	2.926.135.000
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	2.495.935.000	2.926.135.000
Program Pengembangan Destinasi dan Promosi Pariwisata	1.649.357.000	2.005.027.000
Fasilitasi Paguyuban Wisata Purbalingga (Wisbangga)	45.000.000	45.000.000
Pembinaan Desa Wisata dan Pokdarwis	250.000.000	276.920.000
Pembinaan Saka Pandu Wisata/ Pramuka Saka Pariwisata	20.000.000	20.000.000
Pemilihan Kakang Mbekayu	20.000.000	64.000.000
Pengelolaan Obyek-obyek Wisata	520.357.000	730.107.000
Pengembangan Obyek Wisata Sungai Desa Kedungbenda	314.000.000	314.000.000

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	APBD INDUK 2016	PAGU INDIKATIF TAHUN 2016
Pengiriman Duta Wisata	25.000.000	25.000.000
Pengiriman Peserta Lomba Apresiasi dan Konvensi Pokdarwis	35.000.000	35.000.000
Penyusunan DED Balai Budaya		75.000.000
Penyusunan DED Sirkuit Sentul		
Penyusunan DED Tematik Goa Lawa	250.000.000	250.000.000
Promosi Obyek Wisata Purbalingga	170.000.000	170.000.000
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	846.578.000	921.108.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	213.793.000	216.983.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	7.500.000	7.500.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	65.500.000	101.950.000
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	401.785.000	411.675.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	8.000.000	8.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	150.000.000	175.000.000
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	205.082.502.000	288.847.524.593
Bappeda	565.000.000	640.000.000
Program Penataan dan Pengendalian Ruang Ruang Daerah	565.000.000	640.000.000
Fasilitasi P3KP, Eco Distrik dan Komunitas Hijau	155.000.000	155.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	60.000.000	60.000.000
Peninjauan Kembali Perda No. 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031		75.000.000
Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga	350.000.000	350.000.000
Dinas Pekerjaan Umum	204.217.502.000	287.907.524.593
Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	136.092.403.000	209.589.170.843
Pelebaran Jembatan KaliKajar Pada ruas jalan bojongsari - walik		850.000.000
Pelebaran Jembatan Ponggawa Ruas Prigi - Purbayasa	400.000.000	400.000.000
Pembangunan bronjong kawat tebing pasar dan jembatan kali karang ds peking	210.000.000	210.000.000
Pembangunan Bronjong Pengaman Tebing S. Tamba	500.000.000	500.000.000
Pembangunan Jembatan Kali Sana Ruas Jalan Gambarsari - Karangtengah		650.000.000
Pembangunan Talud dan Pelengkap Jalan Ruas Jalan Rajawana - Panusupan (luncu	717.289.000	717.289.000
Pemeliharaan Jalan Drainase Gorong-Gorong Jalan Tanjung Kusuma Kec. Bobotsa	350.000.000	350.000.000
Pemeliharaan Berkala Jalan Kajongan - OWABONG		1.098.634.966
Pemeliharaan Berkala Jalan Bancar - Jatisaba - Lamongan		2.166.700.000
Pemeliharaan Berkala Jalan Dagan - Limbasari	1.045.610.000	1.045.610.000
Pemeliharaan Berkala Jalan Kajongan - Karangbanjar		-
Pemeliharaan berkala Jalan Karanggedang - Pekutukan (DAK-IPD)	792.000.000	792.000.000
Pemeliharaan Berkala Jalan Karangklesem - Karanggambas - Prigi (Lanjutan)	1.298.456.000	1.298.456.000
Pemeliharaan Berkala Jalan Karangreja - Karangjambu (DAK IPD)	3.625.700.000	3.625.700.000
Pemeliharaan Berkala Jalan Kecombron - Panunggalan (DAK-IPD)	1.489.923.000	1.489.923.000
Pemeliharaan Berkala Jalan Kembangan - Karangcengis (Lanjutan) (DAK-IPD)	1.717.200.000	1.717.200.000
Pemeliharaan berkala Jalan Kutawis - Karangnangka (DAK-IPD)	804.000.000	804.000.000
Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkar Alun-Alun		1.608.949.594
Pemeliharaan Berkala Jalan Mewek - Kalimanah Wetan (DAK)	3.742.860.000	3.742.860.000
Pemeliharaan Berkala Jalan Pemuda Bobotsari		2.632.000.000
Pemeliharaan Berkala Jalan Pengalusan - Katelklawu (DAK-IPD)	1.546.790.000	1.546.790.000
Pemeliharaan Berkala Jalan Selaganggang - Serang - Kutabawa (DAK-IPD)	1.495.200.000	1.495.200.000
Pemeliharaan Berkala Jalan Selanegara - Beji (Selakambang) / Lanjutan	795.241.000	795.241.000
Pemeliharaan Berkala Jalan Serma Jumiran CS (DAK-IPD)	1.149.600.000	1.149.600.000
Pemeliharaan Berkala Jalan Sumilir - Karangtengah		2.677.751.310
Pemeliharaan Berkala Jalan Tayasa - Jetis/Gendengan (Lanjutan)	732.522.000	732.522.000
Pemeliharaan Berkala Jalan Tunjungmuli - Kramat		1.916.308.000
Pemeliharaan Berkala Jalan Wiramenggala CS (DAK-IPD)	1.011.980.000	1.011.980.000
Pemeliharaan Jalan Batur (Krangean) - Maribaya	997.500.000	997.500.000
Pemeliharaan Rutin Jalan	10.682.000.000	19.182.000.000
Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.504.000.000	1.504.000.000
Pengadaan Alat Berat (luncuran)	2.402.500.000	2.402.500.000
Pengadaan Tanah Jalan dan Jembatan Pepedan - Tegalpingen		400.000.000
Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan bagi Kepentingan Umum	14.659.999.000	14.659.999.000
Pengadaan Tanaman / Pohon Turus Jalan		350.000.000
Pengaspalan Jalan desa Penolih-Cilapar	1.026.000.000	1.026.000.000
Pengaspalan Jalan Dusun Karanggude - Dusun Pogog Desa Sumampir	800.000.000	800.000.000
Pengaspalan Jalan Kaliori Mergasana	300.000.000	300.000.000
Pengaspalan jalan kawasan Perum Abdi Kencana	500.000.000	500.000.000
Pengaspalan Jalan Lingkar Kecamatan dari Depan Masjid Bodaskarangjati - Dusun	679.000.000	679.000.000
Penggantian Jembatan Kali Caban (Rajawana - Rembang) (DAK-IPD)	1.800.000.000	1.800.000.000
Penggantian Jembatan Kali Pranji Desa Sidakangen		-
Penggantian Jembatan Kali Slinga (Kalikajar - Sidanegara)	720.000.000	720.000.000
Pengkatan Jalan Puspawresti - Watumalang - Manggar		
Peningkatan Jalan Beji - Sumingkir - Pagedangan Kecamatan Bojongsari	1.100.000.000	1.100.000.000
Peningkatan Jalan Bancar - Kecombron (DAK)	18.032.375.000	18.032.375.000
Peningkatan Jalan Bancar - Kecombron (STA Kalikajar - Pagembrungan) (Bangub)	-	9.485.150.000
Peningkatan Jalan Bobotsari - Rembang (Ruas Jalan Bobotsari - Karanganyar)		2.495.706.533